

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**Model Pemberdayaan Perempuan Perkebunan Berbasis Kebutuhan
Strategis Gender
(Studi kasus di Perkebunan Kopi PTPN XII Silo Jember)**

Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Oleh:

Drs. M. Nurhasan, M.Hum/NIDN.0023045910 (Ketua)
Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, MA/NIDN. 0010087712 (Anggota)
Drs. Djoko Susilo, M.Si/NIDN. 0031085909 (Anggota)

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
November 2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Model Pemberdayaan Perempuan Perkebunan Berbasis Kebutuhan Strategis Gender (Studi Kasus di Perkebunan Kopi PTPN XII Silo Jember)

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Drs. MUHAMMAD NUR HASAN M.Hum.
NIDN : 0023045910
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Nomor HP : 081336716725
Surel (e-mail) : mnurhasan56@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : LINDA DWI ERIYANTI S.Sos., MA
NIDN : 0010087712
Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Anggota Peneliti (2)
Nama Lengkap : Drs DJOKO SUSILO M.Si
NIDN : 0031085909
Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 35.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 103.310.000,00

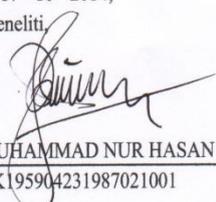
Mengetahui
Dekan F.I.S.I.P



(Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A)
NIP/NIK 195207271981031003



Jember, 17 - 10 - 2014,
Ketua Peneliti

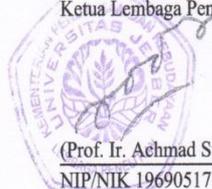


(Drs. MUHAMMAD NUR HASAN M.Hum.)
NIP/NIK 195904231987021001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D)
NIP/NIK 196905171992011001



RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tahun kedua dari dua tahun yang direncanakan. Penelitian ini akan mendeskripsikan kebutuhan strategis gender di masyarakat perkebunan. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menemukan model pemberdayaan perempuan perkebunan yang berbasis kebutuhan strategis gender. Lokasi yang dipilih untuk ini adalah perkebunan kopi Silosanen yang dikelola oleh PTPN XII Silo Kabupaten Jember, dengan alasan penyerapan tenaga kerja di perkebunan ini cukup besar, mencapai 1479 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi literatur, studi dokumentasi dan Focus Group Discussion. Luaran penelitian tahun kedua ini berupa model pemberdayaan perempuan berbasis kebutuhan strategis gender yang akan dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal nasional, dan buku pedoman / modul pemberdayaan perempuan perkebunan. Dari penelitian ini ditemukan model pemberdayaan yang cocok untuk perempuan buruh perkebunan berupa Sekolah Perempuan Berdaya dan Pengorganisasian buruh perempuan perkebunan. Sekolah Perempuan Berdaya dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun kesadaran kritis perempuan perkebunan, sedangkan pengorganisasian merupakan rencana tindak lanjut dalam proses pemberdayaan tersebut.

Keywords : *Model, Pemberdayaan Perempuan, Kebutuhan Strategis Gender, pengorganisasian, Sekolah Perempuan, kesadaran kritis*

PRAKATA

Penelitian berjudul Model Pemberdayaan Perempuan Perkebunan, Studi kasus di Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen ini diharapkan memberikan manfaat bagi buruh perempuan, bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan, bagi LSM maupun ORMAS yang memiliki perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan perkebunan, dan masyarakat luas. Perbaikan kualitas hidup buruh perempuan perkebunan adalah tanggungjawab semua pihak, sehingga kerjasama yang baik, diharapkan akan mewujudkan cita-cita pemberdayaan ini.

Masih banyak kelemahan dalam proses di lapangan maupun pelaporan yang dilakukan oleh Tim Peneliti. Untuk itu kami akan sangat berterimakasih jika ada saran dan kritik yang disampaikan oleh pembaca demi perbaikan kualitas penelitian ini.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Kepala Lembaga penelitian Universitas Jember, Dekan Fisip Universitas Jember, Manajer PTPN XII Silosanen, Jember, Kepala BPPKB Kabupaten Jember, Kepala Bapemas Kabupaten Jember, Kepala Desa dan Aparat Desa Mulyorejo, Buruh dan Karyawan PTPN XII Silosanen. Juga untuk pihak-pihak yang telah berkontribusi secara langsung dan tidak langsung bagi terlaksananya penelitian ini.

Jember, November 2014

Tim peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
BAB 4. METODE PENELITIAN	16
BAB 5. HASIL PENELITIAN	19
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	44
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
- Daftar Riwayat Hidup Peneliti	
- Artikel Jurnal	
- Modul Pemberdayaan Perempuan Perkebunang	

BAB 1

PENDAHULUAN

Perbedaan akses terhadap pendidikan, perekonomian, politik, dan kesehatan menjadikan perempuan tersisih dalam berbagai segi kehidupan. Berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah penduduk perempuan di Jawa Timur masih lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yakni 50,54%. Namun demikian, dalam kehidupannya kondisi perempuan tidak lebih baik dari laki-laki. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia yang tinggal di Pedesaan 18,08 juta orang atau 14,70% pada September 2012, dan dari jumlah tersebut 70% diantaranya adalah perempuan. Sementara itu, di seluruh Indonesia, angka pengangguran terbuka perempuan juga lebih tinggi untuk kelompok umur 15-64 tahun yakni 7,63% dibanding 5,90% laki-laki yang menganggur. (BPS, 2011)

Di bidang politik, jumlah perempuan parlemen hasil pemilu 2009 hanya 101 atau 18% dari total 560 anggota DPR. Jumlah perempuan di DPD hanya 27,7% atau 36 dari total 132 orang. Dari total seluruh anggota DPRD di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur sebanyak 1678 orang, jumlah anggota dewan yang berasal dari kalangan perempuan hanya 234 orang atau 13,91%. Sementara itu, jumlah perempuan caleg terpilih di Kabupaten Jember periode 2009-2014, hanya 7 dari 50 orang atau 14%. (KPU, 2009)

Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh perempuan dan tingginya ketergantungan perempuan pada laki-laki untuk pengambilan keputusan berdampak buruk pada kesehatan perempuan. Budi Rahaju, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur menyebutkan Jember menduduki posisi tertinggi angka kematian ibu di Jawa Timur sejak tahun 2010. (<http://bappeda.jatimprov.go.id>). Bahkan Humas Dinas Kesehatan Jember, Yumarlis menegaskan angka kematian ibu di kabupaten jember sepanjang tahun 2012 mencapai 339 orang atau sekitar 34%. (<http://kissfmjember.com>)

Konstruksi gender di masyarakat yang patriarkhis menempatkan perempuan pada posisi yang seringkali dirugikan. Perbedaan gender itu

membawa dampak ketidakadilan bagi perempuan, yakni marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban ganda (Fakih, 2008). Marginalisasi dan subordinasi yang ada dimasyarakat dan dilegitimasi oleh negara dengan kebijakan yang tidak menganggap penting kebutuhan perempuan dan secara umum tidak berpihak pada perempuan telah mengakibatkan kemiskinan. Pelekatannya stereotype negatif pada perempuan, mengakibatkan perempuan yang seringkali menjadi korban ketidakadilan, dan kekerasan justru dianggap sebagai pihak penyebab kekerasan. Bahkan oleh aparat pemerintah yang seharusnya menegakkan hukum untuk menjamin hak semua warganegara, termasuk perempuan. Kekerasan berupa pemerkosaan, pemukulan atau serangan fisik, penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi dan KB, kekerasan terselubung, pelecehan seksual, menimpa perempuan dari berbagai usia, berbagai kelas sosial, di ruang publik, bahkan di dalam rumahnya sendiri.

Perempuan yang bekerja diruang publik, karena masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan rumahtangga, maka ia harus menanggung beban kerja ganda, yakni tetap mengurus rumah tangga, dan masih harus bersaing dengan laki-laki di wilayah public dengan system yang masih menguntungkan laki-laki.

Sementara itu kehidupan perempuan yang tinggal di wilayah perkebunan juga tidak lepas dari permasalahan yang muncul akibat ketimpangan relasi gender. Para tenaga kerja perkebunan, termasuk perempuan di perkebunan, sangat tergantung kepada perkebunan, maka secara tidak langsung kelangsungan hidup mereka sangat dipengaruhi oleh produktivitas di perkebunan begitu juga sebaliknya. Perkebunan juga sangat membutuhkan buruh yang murah untuk menjalankan produksinya. Peran ganda buruh perempuan perkebunan, baik sebagai buruh dan ibu rumah tangga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kehidupan sosial ekonominya.(<http://repository.upi.edu>)

Areal kopi di Jawa Timur pada tahun 2011 seluas 99.122 ha dengan produksi 37.397 ton serta produktivitas rata-rata 546 kg/ha/tahun. Areal perkebunan kopi rakyat seluas 57.764 ha (56,5 %) dari total areal kopi di Jawa

Timur. Sisanya merupakan milik Perkebunan Besar Negara seluas 21.327 ha (22,4%) dan Perkebunan Besar Swasta 20.031 ha (21,0 %).(Disbun Jatim, 2011)
Jumlah penduduk Jawa Timur yang terlibat pada kegiatan perkebunan secara langsung pada tahun 2011 mencapai 4.283.936 orang atau sekitar 11,40 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan sebesar 37.576.011 orang. Sumbangan sub Sektor Perkebunan terhadap pendapatan petani yang mengusahakan tanaman perkebunan di Jawa Timur dalam kurun waktu 2007 - 2011 memiliki kontribusi yang berkisar antara 8,14 - 11,79 %. (Data Disbun Jatim 2011)

Model pemberdayaan perempuan yang selama ini ada belum menyentuh kebutuhan strategis gender perempuan. Kebutuhan strategis gender muncul dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat dan terkait dengan pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol. (<http://sulbar.bkkbn.go.id>). Kebutuhan strategis gender tidak lagi berorientasi pada bagaimana seseorang bias menjalankan fungsi sesuai tugas dan peran gender masing-masing. Tetapi lebih kepada upaya membangun kesetaraan gender sehingga ketika akses dan kontrol terhadap kehidupan bagi perempuan dan laki-laki terbuka secara sama, maka kebutuhan praktis genderpun akan terpenuhi.

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.2. Pendekatan dalam Pemberdayaan perempuan

Keberhasilan pembangunan suatu negara diukur dengan angka GDP (*Growth Domestik Product*), dan sejak tahun 1990 UNDP (*United Nation Development Program*) menambahkan indikator baru berupa HDI (*Human Development Index*). HDI mengukur aspek usia harapan hidup, angka kematian bayi, dan kecukupan pangan. Dalam hal ini pembangunan juga diindikasikan dengan pemberdayaan masyarakat.

Setelah lima tahun berjalan, UNDP memerinci lebih lanjut tentang arti pemberdayaan masyarakat, yakni bukan hanya untuk seluruh strata masyarakat, tetapi yang terpenting adalah untuk segmen perempuan. Oleh karenanya konsep HDI mulai tahun 1995 ditambah dengan konsep kesetaraan gender, dan perhitungan yang digunakan adalah GDI (*Gender Development Index*). GDI mencakup kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan dan ukuran GEM (*Gender Empowerment Measure*) yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan sector yang lain. (Megawangi, 1999)

Pendekatan pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Indonesia dalam rangka peningkatan peran perempuan menurut Hubeis (2010) adalah:

1. Pendekatan kesejahteraan : pengembangan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga atau pemenuhan kebutuhan praktis gender perempuan yang terkait dengan pelaksanaan peran reproduksi (domestik) perempuan.
2. Pendekatan penyamaan hak : diarahkan pada upaya kesamaan pengembangan peran perempuan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan seperti halnya laki-laki. Pelaksanaannya dengan pemenuhan kebutuhan strategis gender yang memperhatikan tiga peran perempuan yakni peran produktif, reproduktif dan peran sosial.
3. Pendekatan anti kemiskinan : pemenuhan kebutuhan praktis gender yang dikaitkan dengan keperluan perempuan untuk meningkatkan peran

produktifnya. Kegiatan usaha kecil yang memungkinkan perempuan memperoleh pendapatan.

4. Pendekatan efisiensi : adanya jaminan terjadinya proses pembangunan yang lebih efektif dan efisien, kontribusi perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi.
5. Pendekatan penguatan : upaya pemempudayaan perempuan untuk mandiri. Subordinasi perempuan bukan hanya karena ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki tetapi juga sebagai akibat penindasan kolonial dan neokolonial. Pemenuhan kebutuhan strategis gender dilakukan dengan mobilisasi dari bawah keatas, sedangkan pemenuhan kebutuhan praktis gender diarahkan sebagai upaya melawan penindasan.
6. Pendekatan gender : kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan mencakup kebersamaan dalam berbagi pekerjaan rumahtangga, pengawasan sumberdaya dan kekuasaan, pengambilan keputusan keluarga terhadap penggunaan sumberdaya dan hasilnya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang dibayar, partisipasi politik, dan berbagi upah yang lebih adil (Hubeis, 2010).

Tabel 2.1

Perkembangan Pendekatan Kebijakan Gender (Moser, 1989)

Pendekatan kebijakan	Tujuan	Implementasi	Asumsi
Kesejahteraan (Welfare) 1950-1970, masih digunakan	Melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan semata-mata sebagai “ibu yang lebih baik” dan ibu rumah tangga	Proyek-proyek kesejahteraan social fokus pada bantuan pangan, nutrisi seperti ketrampilan masak yang lebih tinggi, dan proyek-proyek KB	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan dilihat sebagai penyebab ketertinggalan • peran pasif perempuan dalam penelitian pertanian, SDA dan pembangunan • Tidak ada kaitan antara perempuan, gender dan isu strategis seperti

			nutrisi, kesehatan dan pangan
Kesamaan (Equity) 1975-1985, dipromosikan pada konferensi perempuan I	<ul style="list-style-type: none"> • upaya mensejajarkan perempuan dalam pembangunan • mempromosikan perempuan sebagai peserta aktif dalam pembangunan • menjawab masalah subordinasi perempuan dalam pembangunan 	Aslinya dikenal dengan istilah "Perempuan dalam pembangunan WID/Women in Development" yang dipromosikan pada permulaan dekade Perempuan PBB dan "Nairobi Forward Looking Strategis"	<ul style="list-style-type: none"> • pengakuan atas "triple roles" perempuan dalam pembangunan pada ranah rumah tangga, ekonomi dan komunitas • pengakuan bahwa perempuan memiliki hak-hak dasar tapi juga kebutuhan strategis • penelitian pertanian dan SDA mulai mengakui peran lipat tiga dan kebutuhan strategis perempuan dalam pembangunan • perempuan mulai dilihat sebagai korban pembangunan
Anti Kemiskinan 1970an	<ul style="list-style-type: none"> • untuk meningkatkan produktifitas perempuan miskin • pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi 	Proyek-proyek WID berubah fokus pada proyek-proyek income generating (IGA) skala kecil, proyek-proyek kerajinan tangan adalah tipikal "proyek perempuan"	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas utama pada kerentanan dan marginalisasi ekonomi perempuan • penelitian-2 pertanian dan pembangunan mulai konsentrasi pada IGA perempuan tapi belum melihat kepentingan strategis perempuan
Efisiensi 1980an	<ul style="list-style-type: none"> • mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek-proyek WID berfokus pada proyek- 	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan diakui produktif dalam pertanian dan

	<p>efisiensi dalam penelitian dan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan partisipasi perempuan dalam penelitian dan pembangunan 	<p>proyek sektoral seperti perempuan dan kehutanan, perempuan dan perikanan dsb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • proyek-proyek pembangunan masih berkuat pada pemenuhan kebutuhan dasar perempuan • beberapa proyek mulai mengadopsi perspektif gender daripada hanya berbicara tentang perempuan 	<p>management SDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • perempuan dilihat sebagai solusi terhadap pembangunan; waktu mereka dilihat sebagai elastis • relasi gender sebagai relasi kuasa belum dikenali • Pengarusutamaan isu perempuan dan gender dalam pembangunan untuk efisiensi sumber daya proyek
<p>Pemberdayaan Akhir 1980an</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pemberdayaan perempuan melalui hak yang lebih besar untuk menentukan nasib sendiri • sub-ordinasi sebagai akibat dari penindasan laki-laki, juga sistim yang menindas laki-laki dan terlebih perempuan 	<p>Gender dan pembangunan (GAD) berfokus pada kebutuhan dasar dan strategis dan kerap dipisahkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pengakuan bahwa walaupun fokus pada peran perempuan adalah penting, namun relasi dengan laki-laki dan seluruh sistim politik dan ekonomi adalah sangat penting • Perempuan sebagai agen pembangunan dan agenda kolektif perempuan adalah penting • Perlu dikaji ulang penelitian dan pembangunan

Sumber : Kerangka Analisis Perencanaan Gender, Jonatan A. Lassa, 2012,

Women in Development (WID)

Pendekatan ini berasumsi bahwa perempuan tidak dilibatkan dalam pembangunan karena adanya anggapan perempuan tidak berpendidikan, kurang pelatihan, maupun tidak ada rasa percaya diri. Jadi untuk bisa dilibatkan dalam pembangunan, perempuan harus meningkatkan kemampuannya (Dewi, 2006). Konferensi Perempuan Sedunia I tahun 1975 telah memunculkan perspektif *Women in Development (WID)* yang menuntut agar terdapat persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan (Caraway, 1998). Perempuan seharusnya diintegrasikan dalam proses pembangunan, sehingga perempuan memiliki akses di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

WID merupakan reaksi dari kaum feminis terhadap kecenderungan pengungkungan perempuan di wilayah domestik. Gerakan yang dilakukan akhir 1960-1970an ini menempatkan perempuan sebagai aset dan sasaran pembangunan. Cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan produktifitas dan pendapatan perempuan, memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga, mengintegrasikan perempuan dalam pelaksanaan proyek-proyek, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, juga meningkatkan kesehatan perempuan. Upaya berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan tetapi tidak serta merta membuat perempuan lebih berdaya. (Darwin, 2005).

Keterlibatan perempuan di bidang ekonomi akan meningkatkan posisi ekonomi perempuan, sehingga status dan kedudukan perempuanpun akan meningkat di masyarakat. Konsep WID memfokuskan pada perubahan situasi, yang bertujuan untuk menarik dan menempatkan perempuan dalam arus pembangunan, karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang melimpah, yang dapat menggerakkan roda pembangunan, asalkan kemampuan mereka ditingkatkan (Silawati, 2006). WID akhirnya memberikan perhatian khusus pada usaha peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, sebagai satu bukti pengintegrasian mereka di bidang ekonomi.

Kesuksesan besar dari pendekatan WID ini adalah berdirinya biro dan kementerian pemberdayaan perempuan serta munculnya organisasi-organisasi perempuan di berbagai negara. Pada paradigma ini, selain di bidang ekonomi, perempuan juga didorong atau dilibatkan dalam berbagai organisasi perempuan, seperti organisasi PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, maupun organisasi Bhayangkari, dimana keanggotaan perempuan dalam organisasi ini akibat keberadaan kedudukan para suami-suami mereka. (Marhaeni, 2008)

Gender and Development (GAD)

Belajar dari kegagalan strategi WID, pada tahun 1980an, gerakan gender dan pembangunan (*Gender and Development*) muncul sebagai strategi baru. Gerakan ini berasumsi bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan adalah ketidakadilan gender. Hasil penting strategi GAD adalah diterimanya CEDAW yang diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978. Tujuan dari strategi GAD adalah menjadikan gender sebagai arus utama pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat oleh negara, aksi yang dilakukan oleh masyarakat beserta elemen-elemennya, dan institusi masyarakat dan negara, menjadi sensitive gender. (Darwin, 2005).

Pada paradigma ini diperkenalkan konsep gender, dimana studi tentang perempuan dihubungkan dengan laki-laki. Konsep gender ini muncul setelah Konferensi Perempuan Sedunia III di Nairobi, Kenya tahun 1985. Perempuan dengan kategori social berbeda memiliki kepentingan yang berbeda, apalagi jika dibandingkan dengan laki-laki. Terjadi ketimpangan hubungan gender dibidang sosial dan politik yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang terjadi baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara, yang mengakibatkan ketertinggalan perempuan. (Silawati, 2006).

Relasi sosial antara perempuan dan laki-laki yang timpang seharusnya dibongkar. Kekuasaan laki-laki dibidang ekonomi, sosial, dan budaya perlu didistribusikan ulang. (Dewi, 2006). Ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan muncul karena struktur dan proses sosial politik. Ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan terlihat pada akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesempatan dan manfaat, serta dalam pengambilan keputusan. Untuk itu masyarakat dan

berbagai institusi harus mengubah cara berpikir dan praktek untuk mendukung persamaan kesempatan, pilihan, dan kesetaraan.

Tabel 2.2
Pemahaman Masalah Gender Inequality

Pendekatan WID	Pendekatan WAD
Analisis	
Perempuan tidak dilibatkan dalam pembangunan karena perempuan kurang : <ul style="list-style-type: none"> • pendidikan, • pelatihan • percaya diri 	Struktur dan proses politiklah yang menciptakan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya (akses dan control) • Kesempatan dan manfaat • Pengambilan keputusan (partisipasi dan representasi)
Permasalahan	
perempuan dan laki-laki	ketidaksetaraan perempuan
Pendekatan	
perempuan meningkatkan kemampuannya agar bisa terlibat dalam pembangunan	masyarakat dan berbagai institusi mengubah cara berfikir dan praktek untuk mendukung persamaan kesempatan, pilihan, dan kesetaraan

Sumber: *Oxfam Great Britain Gender resources Package*, dalam Jurnal Perempuan, 2006.

Pengarusutamaan Gender (PUG) atau *Gender Mainstreaming*

Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perempuan IV di Beijing tahun 1995, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan (Silawati, 2006). PUG secara formal diadopsi dalam *Beijing Platform for Action* (BPFA) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pihak-pihak lain harus mempromosikan kebijakan *gender mainstreaming* secara aktif dan nyata terlihat dalam semua kebijakan dan program, sehingga sebelum keputusan diambil, analisis tentang dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki telah dilakukan (Dewi, 2006).

PUG adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, merupakan proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak, organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumberdaya. Tujuan

PUG adalah mengubah alokasi sumberdaya, kuasa, kesempatan dan norma social. (Rasavi dan Miller, 1995). Naila Kabeer mengklasifikasikan kebijakan pembangunan, terdiri dari (1) kebijakan gender blind (Buta gender), yang tidak membedakan perbedaan perempuan dan laki-laki dan cenderung meminggirkan perempuan, (2) Kebijakan sadar gender yang mengenali perbedaan antara prioritas dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. (Kabeer,1994).

2.3. Kebutuhan strategis gender

Perempuan sebagai sebuah kelompok mempunyai kebutuhan yang khusus yang berbeda dengan kebutuhan laki-laki sebagai sebuah kelompok. Hal ini disebabkan oleh konstruksi peran kerja perempuan yang meliputi kerja reproduktif, kerja produktif dan kerja komunitas, ditambah lagi posisi perempuan yang ter subordinat dari laki-laki dalam masyarakat. (<http://genderpedia.blogspot.com>).

Pemenuhan kebutuhan strategis perempuan dilakukan dengan berusaha mengatasi ketertinggalan perempuan di masyarakat dengan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan (Mulyono, 2010). Kebutuhan strategis gender merupakan kebutuhan jangka panjang yang bertujuan mengubah peran gender agar perempuan dan laki-laki dapat berbagi adil dalam pembangunan. (Demartoto dan Budiarti, 2010)

Kebutuhan strategis berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-laki, seperti perubahan pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan, kontrol terhadap sumber daya dan lain-lain. Kebutuhan strategis gender juga meliputi perubahan hak-hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi, persamaan upah, dan sebagainya (Dep. Kehutanan, 2005). Dengan demikian pemenuhan kebutuhan strategis merupakan program pemberdayaan perempuan dalam mematangkan potensi yang memungkinkan perempuan dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di peran publik (Subhan, 2002).

Kebutuhan strategis akan lebih cepat meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, mengingat kesenjangan gender selama ini bersumber dari pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang memberikan

posisi lebih rendah pada perempuan, sehingga kekuasaan yang dimiliki perempuan baik dalam rumah tangga maupun masyarakat juga lebih rendah daripada laki-laki. Jika pembagian kerja ini sudah dapat diperbaiki, misalnya perempuan juga memiliki akses yang tinggi dibidang pekerjaan, suami juga berkontribusi pada pekerjaan rumah tangga, dan dapat dicapai persamaan tingkat upah antara laki-laki dan perempuan, maka kekuasaan perempuan akan dapat ditingkatkan seperti dalam kepemilikan barang-barang berharga, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Sara H. Longwe (dikutip Marwanti dan Astuti, 2012) menyebutkan “Kerangka Pemampuan Perempuan” untuk pemberdayaan perempuan mencakup tiga hal: (1) *capacity building* bermakna membangun kemampuan perempuan; (2) *cultural change* yaitu perubahan budaya yang memihak kepada perempuan; (3) *structural adjustment* adalah penyesuaian struktural yang memihak perempuan.

Kerangka Longwe berfokus langsung pada penciptaan situasi/pengkondisian di mana masalah kesenjangan, diskriminasi dan subordinasi diselesaikan. Longwe menciptakan jalan untuk mencapai tingkat pemberdayaan dan kesederajatan (*equality*) dimana ditunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar-praktis perempuan tidak pernah sama dengan pemberdayaan maupun sederajat (*equal*). Pengambilan keputusan (kontrol) merupakan puncak dari pemberdayaan dan kesederajatan (*equality*). Kerangka Longwe bisa diturunkan menjadi dua alat, yaitu :

1. Level kesederajatan (*Equality level*)

Tujuan utama alat ini adalah untuk menilai apakah sebuah proyek/program intervensi pembangunan mampu mempromosikan kesederajatan dan pemberdayaan perempuan atau tidak. Asumsi dasar dibalik alat ini adalah bahwa titik tercapainya kesederajatan (*equality*) antara perempuan dan laki-laki mengindikasikan level pemberdayaan perempuan. Ada lima level dalam kesederajatan dan pemberdayaan yang perlu dicermati, yaitu level kontrol (*decision making*), Partisipasi, Kesadaran Kritis, Akses, dan Kesejahteraan (*welfare*, kebutuhan dasar praktis).

Tabel 2.3

Level kesederajatan dan pemberdayaan

	Equality		Pemberdayaan	
	Perempuan	Laki-laki	perempuan	Laki-laki
Kontrol (decision Making)	↑	↑	↑	↑
Partisipasi				
Kesadaran Kritis				
Akses				
Welfare (kebutuhan dasar-praktis)				

Sumber : Jonatan A. Lassa, 2012, Kerangka Analisis Perencanaan Gender.

- Isu Spesifik Perempuan, dengan tujuan pada pengenalan akan kebutuhan spesifik perempuan. Asumsi utamanya adalah bahwa semua isu perempuan berkaitan dengan equality dalam peran sosial dan ekonomis.

Sedangkan unsur utama dalam proses pemberdayaan perempuan menurut Naila Kabeer (2001, dikutip Claros and Zahidi, 2005: 2-5), terdiri dari : 1. *Welfare* (Kesejahteraan) yang mencakup partisipasi ekonomi perempuan, pencapaian pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. 2. *Access* (Akses) terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan laki-laki. 3. *Consientisation* (Kesadaran) akan perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender. 4. *Participation* (Partisipasi), yakni partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. (Claros dan Zahidi, 2005: 4). 5. *Equality of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan), dimana kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan. Dengan demikian untuk memberdayakan perempuan, lima tingkatan yang harus dilakukan adalah mewujudkan pemerataan tingkat kesejahteraan, pemerataan akses, pemerataan kesadaran, pemerataan partisipasi, dan pemerataan penguasaan (Sabtandari, 2010).

Hakekat manusia terletak pada kesadaran, keunikan pada setiap individu dan untuk menjadi bebas manusia harus menggunakan rasio karena rasionalitas

sangat penting untuk mengerti prinsip-prinsip moralitas yang dapat menjamin otonomi manusia dan menjadi bebas. (<http://staff.blog.ui.ac.id>). Perempuan harus memiliki kebebasan secara penuh agar bisa bersaing dan memiliki kedudukan seperti juga halnya laki-laki. Perempuan sendiri harus sadar bahwa mereka adalah kelompok tertindas, dan untuk itu mereka harus melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap laki-laki.

Pekerjaan yang dilakukan perempuan di sektor domestik telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Pendidikan adalah cara paling efektif melakukan perubahan sosial. Kesetaraan politik antara perempuan dan laki-laki bisa dilakukan dengan penguatan peran perempuan di ruang publik.

Perempuan sebagai makhluk yang rasional, yang memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, oleh karenanya perempuan harus diberi hak yang sama dengan laki-laki. Selama ini budaya dan hukum yang berlaku di masyarakat menjadi hambatan yang menghalangi perempuan masuk dan berhasil di ruang publik. Oleh karenanya perlu adanya perlakuan sama antara perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan, hak suara, dan hukum negara. (Kristi Purwandari, 2007).

Perempuan harus masuk kedalam struktur masyarakat dan kenegaraan yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Perlu pendekatan pendekatan psikologis untuk membangkitkan kesadaran individu melalui diskusi-diskusi dan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan sehingga menjadi peraturan baru yang memposisikan perempuan sama dengan laki-laki.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kebutuhan strategis gender di masyarakat perkebunan
2. Merumuskan model pemberdayaan perempuan berbasis kebutuhan strategis gender

3.2. Manfaat Penelitian

Kondisi perempuan tidak akan lebih baik tanpa tanpa pembongkaran secara mendasar konstruksi gender di masyarakat yang patriarkhis. Model pemberdayaan perempuan yang berbasis kebutuhan strategis gender memiliki dampak jangka panjang yang menjadi landasan bagi pemenuhan kebutuhan praktis perempuan.

Dengan adanya model pemberdayaan yang tepat, akan terjadi perubahan dalam kehidupan perempuan yang lebih beradab, setara dan berkeadilan. Dampak jangka panjangnya adalah terjadinya peningkatan kualitas hidup perempuan yang bisa meningkatkan produktifitas kerja di sektor publik maupun privat, yang bagi perempuan pekerja perkebunan akan berkontribusi pada perbaikan sistem kehidupan di perkebunan secara keseluruhan.

BAB 4

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di perkebunan kopi yang ada di kabupaten Jember. Alasan Pemilihan kabupaten Jember, karena luas area tanaman perkebunan kopi di Jember adalah yang terbesar kedua di Jawa Timur, yakni mencapai 6507 Ha. (BPS Jatim, 2011). Daerah penelitian ditentukan dengan sengaja pada daerah perkebunan kopi Silosanen yang dikelola PTPN XII di kecamatan Silo, yang penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1479 orang. (data Disbun, 2006)

3.2 Teknik Pengumpulan Data

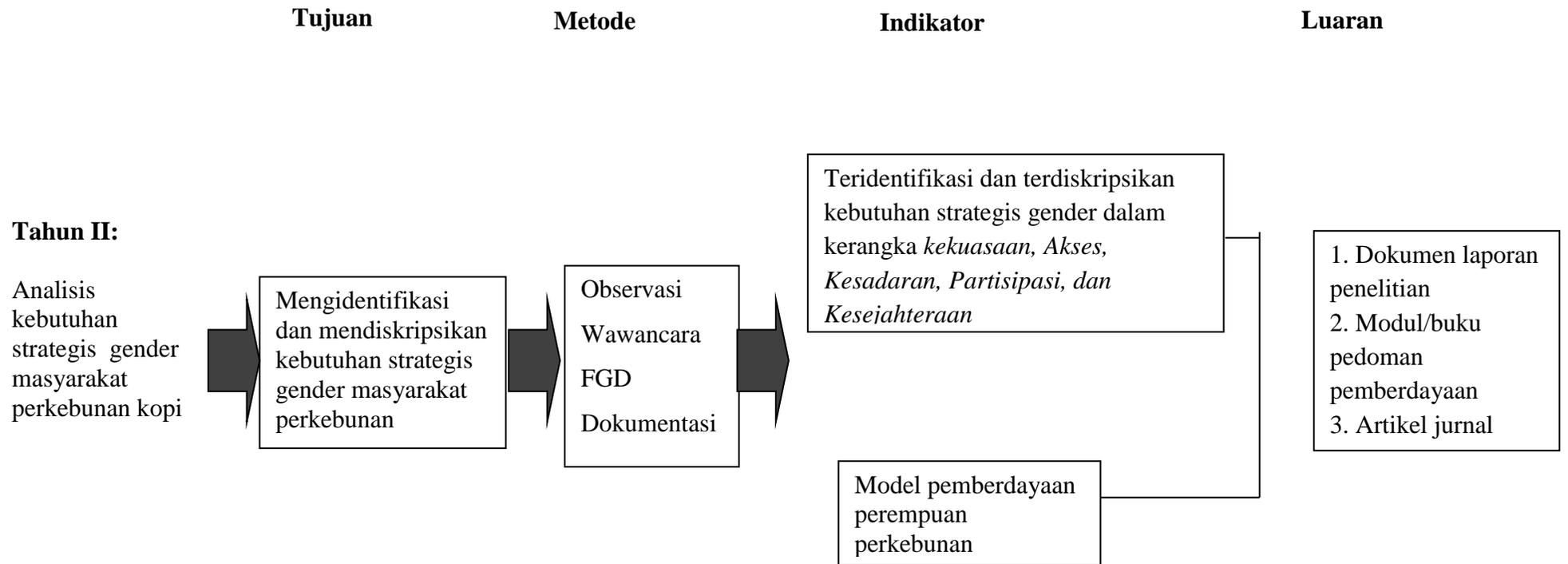
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : *Pertama*, Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi dilokasi penelitian dan hasil wawancara dengan purposive sampling dan metode snowball terhadap dinas terkait dengan pemberdayaan perempuan, Pengelola Perkebunan, LSM dan Ormas yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, perempuan dan laki-laki pekerja perkebunan, serta aparat desa setempat. *Kedua*, Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait, pengumpulan literatur, karya-karya tulis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta sifatnya mendukung data primer.

3.3 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan rancangan analisis data mengikuti model interaktif analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1992), yakni melalui proses *Data reduction, Data Displays, Conclusion Drawing /Verification*. *Pertama*, reduksi data dilakukan semenjak pengumpulan data dengan penyederhanaan klasifikasi data kasar di lapangan. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. *Kedua*, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi

menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, interpolasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*spesifik*) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (*general*).

3.4. Bagan Alur Penelitian *MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERKEBUNAN BERBASIS KEBUTUHAN STRATEGIS GENDER*



BAB 5

Hasil Penelitian

5.1 Profil PTP Nusantara XII Kebun Silosanen

Perkebunan Silosanen adalah salah satu unit perkebunan yang ada di lingkungan PTPN XII, dan merupakan peninggalan zaman Belanda. PTPN XII sendiri merupakan peralihan dari CV Kultur Bank (1892). Tahun 1957 perusahaan perkebunan ini berbentuk PPN Baru, pada tahun 1961 diubah namanya menjadi PPN Aneka Tanaman XII. Tahun 1968 berubah lagi menjadi PNP XXIII, dan baru tahun 1972, perkebunan ini berbentuk PT Perkebunan XXIII. Setelah itu pada tahun 1996 berubah menjadi PTPN XII sampai saat ini.

5.1.1 Letak Geografis

Kebun Silosanen terletak di pegunungan Meru Betiri tepatnya di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dari kota Jember, Kebun Silosanen berjarak 48 km, sedangkan dari Surabaya berjarak 250 km. Perkebunan ini terletak di ketinggian 450-850 m dari permukaan laut, dengan temperatur 20-27°C. Topografi tanahnya berbukit dengan kemiringan antara 15%-70%. Jenis tanahnya Latosol Coklat kemerahan 96,9% dan Regosol 3,1% bahan induk batuan yang berasal dari vulkanis intermedier dengan kandungan unsure hara yang cukup. pH tanah berkisar 5 cocok untuk berbagai jenis tanaman perkebunan seperti kopi, dan tanaman keras lainnya. Sedangkan iklim di Perkebunan Silosanen adalah tipe C dengan curah hujan rata-rata 2.085 mm dengan hari hujan 122 hari pertahun.

5.1.2 Area Perkebunan

Luas area perkebunan keseluruhan mencapai 1.430,9709 ha, dengan hak guna usaha yang akan berakhir tanggal 1 Januari 2021. Administrasi pertanahan yang dimiliki PTPN XII kebun Silosanen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta tanggal 7-4-1995 No.23/HGU/BPN/1995 berdasar penunjuk Tanah Negara bekas HGU no.6/Pace/208/478/1973, luas 14.309.709 m² DI.301.No.2783/II/1995. Sedangkan sertifikat tanahnya bernomor 12.13.17.07.2.00001.

Tabel 5.1
Alokasi area Konsensi Kebun Silosanen

No	Alokasi area	Luas area (ha)
1.	TM kopi Robusta Afd. Darungan	73,02
2.	TM kopi Robusta Afd. Pinang	102,15
3.	TM kopi Robusta Afd Wringin Anom	228,25
4.	TM kopi Robusta Afd. Kampongan	67,41
5.	TBM III kopi Robusta	193,65
6.	TBM II kopi Robusta	14,37
7.	TTAD (X-1) kopi Robusta	304,92
8.	TDP I Sengon	54,68
9.	TTI Sengon	95,13
10.	Jati TT. 1995	1,00
11	Jati TT.2001	2,10
12	Jabon	125,69
13	Areal Konservasi	2,24
14	TTI Alpukat	10,00
15	Tanaman Pisang	60,00
16	Tanaman Semusim	33,17
17	Pembibitan/entres	8,58
18	Demplot kopi	4,00
19	Jalan/curah/Perumahan	50,61
Total Area Konsensi		1430,97

Sumber : Data PTPN XII Kebun Silosanen, 2013

5.1.3 Produktifitas

Produktivitas Kebun kopi Silosanen, yang kesemuanya adalah jenis Robusta, rata-rata dalam 5 tahun terakhir mencapai 730kg/ha/tahun. Jumlah produk kopi Glondong pertahun mencapai 2.513.786 kg. Dari jumlah tersebut dihasilkan produk jadi siap dipasarkan atau disebut kopi pasar rata-rata mencapai 601.256 kg/tahun.

Tabel 5.2 Produksi PTPN XII Kebun Silosanen per Afdeling

Areal Tanaman Menghasilkan /Afdeling	Tahun 2008 (kg)		Tahun 2009 (kg)		Tahun 2010 (kg)		Tahun 2011 (kg)		Tahun 2012 (kg)		Rata-rata (kg)	
	Glondong	Kopi Pasar	Glondong	Kopi Pasar								
Darungan	476.827	113.011	398.813	94.662	427.497	100.622	352.067	81.615	403.954	94.406	411.832	96.863
Pinang	977.339	231.591	493.695	127.193	654.920	153.471	366.457	84.918	640.752	147.683	626.633	148.971
Wringin anom	1.518.406	360.507	1.034.181	252.673	1.337.680	312.874	852.773	197.611	1.058.057	248.304	1.160.219	274.394
Kampongan	338.579	80.873	363.066	86.016	330.761	77.511	306.236	70.986	236.868	55.021	315.102	74.089
Jumlah	3.311.151	785.982	2.289.755	560.544	2.750.858	644.518	1.877.533	435.130	2.339.631	545.414	2.513.786	594.318

Sumber : Data PTPN XII Kebun Silosanen

Tabel 5.3. Produktifitas area Tanam per Hektar

Afdeling	2008 (kg)	2009 (kg)	2010 (kg)	2011 (kg)	2012 (kg)	Rata-rata (kg)
Darungan	502	533	567	460	764	565
Pinang	1.018	623	752	416	1.446	851
Wringin Anom	1.067	821	1.017	642	917	893
Kampongan	336	524	473	433	816	516
Jumlah	762	657	755	510	967	730

Sumber : Data PTPN XII Kebun Silosanen

Dari hasil olahan Kopi Robusta Silosanen 90% dipasarkan ke luar negeri dan 10% sisanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, dengan prosentase mutu ekspor R/WP-1LMS = 67%, R/WP – 4LMS = 23% dan local 10%.

Table 5.4.

Prosentase mutu Kopi Robusta PTPN XII Silosanen

Jenis Produk	Mutu /Grade	Eksport	Lokal
Robusta Wed Processing	1L	20%	
Robusta Wed Processing	1M	35%	
Robusta Wed Processing	1S	10%	
Robusta Wed Processing	4L	7%	
Robusta Wed Processing	4M	12%	
Robusta Wed Processing	4S	4%	
Robusta Dry Processing	1	2%	
Robusta Dry Processing	K		1%
Robusta Wed Processing	B		6%
Robusta Wed Processing	4		1%
Robusta Dry Processing	B		2%
Jumlah		90%	10%

Sumber : Data PTPN XII Silosanen

5.1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga di kebun Silosanen seluruhnya 1.343 orang, dan dari jumlah tersebut hanya 67 orang yang merupakan karyawan tetap dan tenaga kontrak, sedangkan sisanya adalah Karyawan Lepas Harian (KHL). Hanya ada 7 orang pegawai yang memiliki golongan. IIIA, 35 orang Golongan IB-IID, dan 25 orang Golongan IA.

Tabel 5.5
Data Sumber Daya Manusia

Jabatan	Jumlah (orang)				
	IIIA	IB - IID	IA	KHL	Jumlah
Karyawan Pimpinan	7	2			9
Karyawan Pelaksana			2	877	879
Mandor Besar/Sinder		5			5
Mandor Keliling		3	2		5
Mandor Pemeliharaan		3	4	1	8
Mandor Hama/Penyakit			1	4	5
Mandor Pembibitan				5	5
Mandor Tanam				7	7
Mandor TM			1	14	15
Mandor TBM		3	4	5	12
Koordinator Keamanan		1			1
Danton Keamanan		1	1	1	3
Satpam				8	8
Waker				54	54
Keamanan Luar (informan)				25	25
Mandor Teknik		1	1		2
Mandor Bangunan		1			1
Mandor Pengolahan		3		1	4
Operator Genset		2	2	3	7
Sopir Jeep			1	2	3
Sopir Truk		1			1
Sopir Hiline		1	2		3
Juru Tulis Kantor Afdeling			1	7	8
Juru Tulis Kantor Induk		4	2	5	11
Honorer Guru Tk				5	5
Honorer Guru Sd				3	3
Honorer Guru MIBU				7	7
Honorer Guru Ngaji				6	6
Karyawan MBT		4	1		5
Total	7	31	25	1040	1107

Sumber : Data SDM PTPN XII Silosanen, 2012

Di Kebun Silosanen terdapat 6 Afdeling, yakni Darungan Pinang, Wringin Anom, Kampongan, Pabrik, Kantor. Dari keenam Afdeling tersebut disediakan 454 unit perumahan, yang 103 diantaranya dalam kondisi rusak parah dan tidak layak huni.

Tabel 5.6
Data Penduduk, Sarana dan Prasarana

Uraian	Sat	Afdeling						Jml
		Darungan	Pinang	Wringin Anom	Kampongan	Pabrik	Kantor	
Penduduk								
Laki-laki (dewasa/KK)	Org	153	70	87	220	75	25	630
Perempuan (dewasa/Ibu)	Org	101	87	103	207	69	28	595
Anak Sekolah TK	Org	16	11	13	11	7	2	60
Anak Sekolah SD	org	66	32	24	51	13	-	186
Anak Sekolah SMP	Org	32	6	4	22	15	2	81
Anak Sekolah SMA	org	22	8	3	14	14	3	64
Balita	Org	24	16	23	39	15	1	118
Bangunan								
Perumahan	Unit	76	84	89	122	61	22	454
Koperasi	Unit	-	-	-	-	1		1
Masjid	Unit	3	1	1	2			7
Musholla	Unit	5	1	1	-			7
Sekolah TK	Unit	2	1		-			3
Sekolah SD	Unit	1	-		-			1
Sekolah SMP	unit	1	-		2			3
Ternak								
Sapi Cluster				20				20
Sapi PKBL		20	25	25	19	27	8	124
Sapi Pribadi		283	124	143	151	20		721

Sumber : Data PTPN XII Silosanen 2013

5.2. Kebutuhan Strategis Gender masyarakat di Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen

Penelitian yang dilaksanakan pada tahun pertama telah berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan buruh Perkebunan kopi di PTPN XII kebun Silosanen. Dari permasalahan tersebut diidentifikasi beberapa kebutuhan strategis gender bagi perempuan di wilayah perkebunan, yakni :

1. Kekuasaan/kontrol, yakni kemampuan untuk menentukan kegunaan dan fungsi atas sesuatu yang meliputi :
 - a. Sumberdaya, berupa sumberdaya alam (tanah, air, hutan), sumber pengetahuan dan informasi (buku, TV, Radio, Koran), finansial (uang, properti)
 - b. Ideologi, dimana seorang atau golongan masyarakat seringkali menjadi penentu, dukun, ataupun dipercaya, yang akhirnya mengatur bahkan seringkali menentukan benar atau salah nilai-nilai dan cara pandang/cara berpikir warganya
 - c. Pasar, dengan memiliki kontrol atas pasar, berarti juga akan memiliki kendali atas sumberdaya alam dan uang.

2. Akses

Budaya yang berkembang di masyarakat patriarkhis berdampak kepada peluang yang dimiliki perempuan untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh keluarga, maupun yang ada dimasyarakat masih sangat terbatas.

3. Kesadaran kritis

Hingga saat ini belum terbangun kesadaran diri perempuan akan kesetaraan gender, yang berdampak kepada perempuan tidak berusaha untuk mengubah struktur patriarkhi di masyarakatnya.

4. Partisipasi

Di satu sisi, perempuan mendapatkan beban ganda, dimana mereka harus bertanggungjawab atas semua urusan di dalam rumah tangga, dan masih harus ikut mencari nafkah untuk keluarga dan beraktifitas di masyarakat. Namun demikian perempuan tidak mendapatkan tempat dalam aktifitas yang terkait

dengan pengambilan kebijakan baik diruang domestik, yakni dalam lingkup rumah tangga, maupun di ruang publik tatau dalam masyarakat. Hal ini berakibat banyak kebijakan di tingkat bawah sampai atas yang tidak sensitif gender.

5. Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan perempuan buruh perempuan masih sangat rendah, rata-rata hidup dibawah garis kemiskinan, dan dengan fasilitas hidup yang masih sangat terbatas. Mereka masih harus berhadapan dengan permasalahan marginalisasi ekonomi, subordinasi, stereotype negatif, beban ganda dan kekerasan.

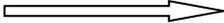
Oleh karenanya perlu ada perubahan dalam masyarakat di wilayah perkebunan kopi PTPN XII Kebun Silosanen, yang juga merupakan kebutuhan strategis gender, yakni :

1. Perbaiki posisi perempuan untuk bisa sharing/berbagi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat.
2. Pengubahan status gender. Pelekatan status gender yang masih berorientasi kelas di masyarakat perlu, sehingga yang ada adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini penting untuk meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan buruh perkebunan terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, di lingkup domestik maupun di ruang publik.
3. Pembangunan kesadaran perempuan dan laki-laki atas pentingnya kesetaraan dalam kehidupan dalam keluarga dan di masyarakat. Tanpa adanya kesadaran dari diri perempuan sendiri, tidak akan muncul upaya perjuangan untuk mencapai kesetaraan. Disisi lain kesadaran laki-laki akan manfaat kesetaraan bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat juga penting, dimana dalam kondisi ini yang diinginkan adalah tidak adanya dominasi salah satu jenis kelamin. Kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan sangat strategis untuk dilakukan dalam proses pemberdayaan ini.

4. Keikutsertaan perempuan dalam setiap proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring). Perlu ada dorongan, baik yang berasal dari kesadaran perempuan sendiri, juga dari lingkungan keluarga dan masyarakat agar perempuan optimal berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan partisipasi perempuan ini diharapkan agar setiap pembangunan yang dilaksanakan, dalam berbagai tingkatan, di level masyarakat secara swadaya, di pemerintah daerah, maupun di pemerintah pusat, akan lebih sensitif dan responsif gender.
5. Pemenuhan kesejahteraan perempuan, dimana ha ini akan terwujud ketika hak-hak perempuan sebagai manusia dan sebagai warga negara sudah terjamin. Hak-hak tersebut diantaranya adalah ; hak politik, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, hak untuk diperlakukan secara adil.

Tabel 5.2.1.

**Kebutuhan strategis gender perempuan Buruh Perkebunan PTPN XII
Silosanen**

Kebutuhan Strategis gender		Mekanisme perubahan
Kontrol		Perbaikan posisi perempuan
Akses		Pengubahan status gender.
Kesadaran kritis		Pembangunan kesadaran perempuan dan laki-laki
Partisipasi		Peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap proses pembangunan
Kesejahteraan		Pemenuhan kesejahteraan perempuan

Sumber : diolah dari data primer

5.3. Model Pemberdayaan Perempuan Perkebunan Berbasis Kebutuhan Strategis Gender

Pemberdayaan perempuan buruh perkebunan PTPN XII kebun Silosanen dilakukan dengan peningkatan kesadaran kritis atas hak, penguatan, pengalihan kekuasaan, peningkatan partisipasi, serta menumbuhkan keseimbangan relasi di antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut secara teknis berupa :

5.3.1. Sekolah Perempuan Berdaya

Sekolah perempuan ini adalah upaya untuk membuka wawasan dan memberikan pengetahuan kepada perempuan buruh perkebunan. Dengan sekolah Perempuan ini diharapkan akan terbangun pola pikir baru yang adil gender. Keadilan dan sensitifitas gender di masyarakat menjadi penting untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan, termasuk dalam pemenuhan-pemenuhan kebutuhan praktis perempuan.

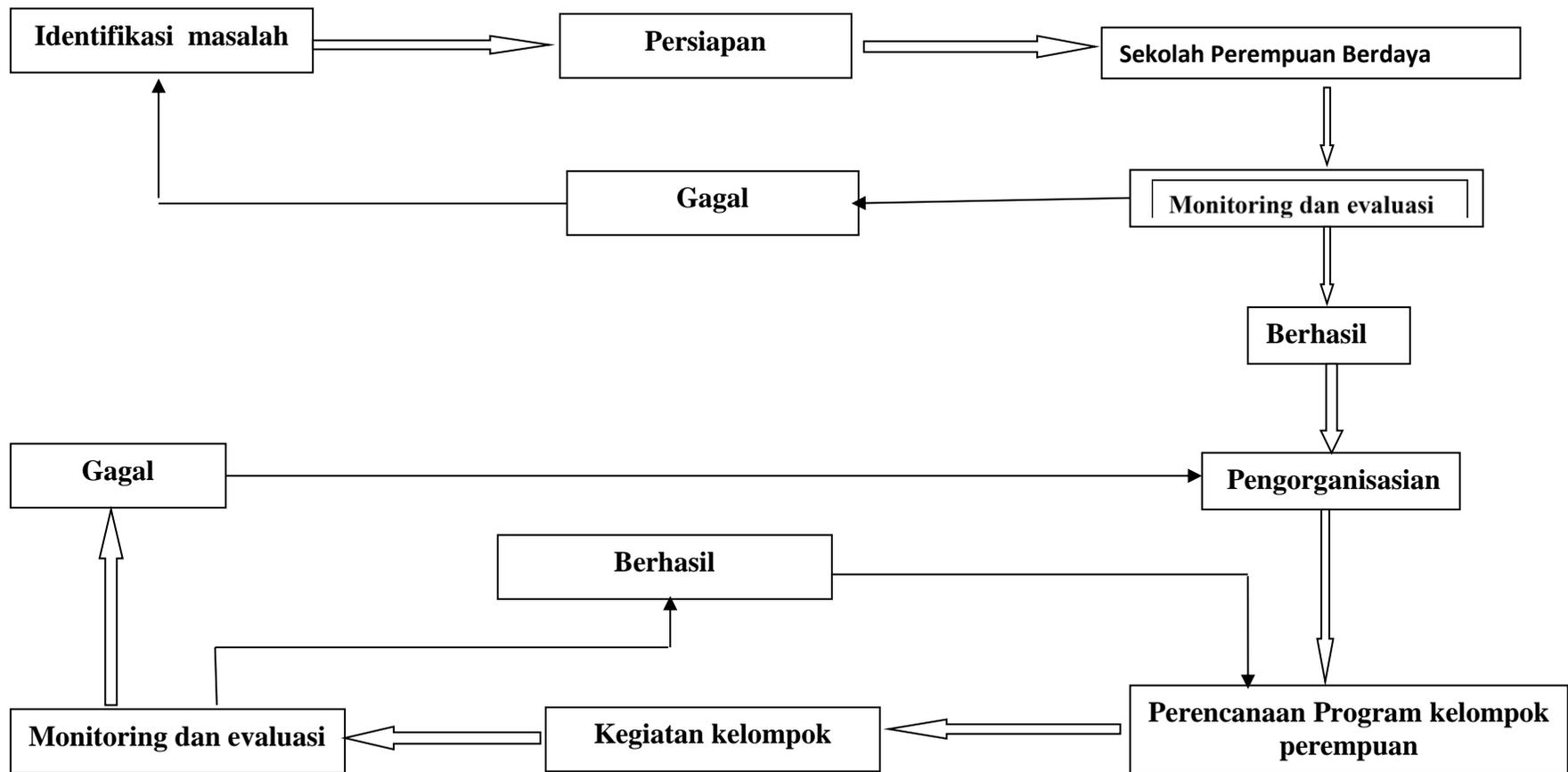
Sekolah perempuan ini membutuhkan fasilitator yang memiliki pemahaman gender, pemahaman situasi dan kondisi perempuan di perkebunan Silosanen, juga memiliki semangat pengabdian, komitmen, dan empati yang tinggi. Peserta sekolah Perempuan adalah buruh perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen, baik yang berasal dari buruh kebun, buruh pabrik, buruh bedeng, maupun mandor. Sekolah perempuan diselenggarakan secara rutin setiap dua minggu sekali, pada hari minggu selama 10 kali pertemuan.

5.3.2. Pengorganisasian buruh perempuan

Pengorganisasian buruh perempuan penting untuk menjadi wadah bagi perempuan buruh Perempuan. Organisasi yang dibentuk sekaligus akan dijalankan oleh perempuan buruh PTPN XII Kebun Silosanen ini diharapkan mampu menjadi : (1) media bagi para anggotanya untuk berbagi informasi, (2) untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi, (3) Pencarian solusi bersama permasalahan yang ada, (4) sebagai media untuk menyebarkan kesadaran gender bagi perempuan di wilayah perkebunan PTPN XII kebun Silosanen, (5) wadah bagi perjuangan kepentingan kaum buruh ketika berhadapan dengan pihak perusahaan PTPN XII Silosanen maupun pengusaha lain yang selama ini memanfaatkan tenaga buruh tersebut.

Gambar 5.1

Model Pemberdayaan Perempuan Buruh Perkebunan Kopi PTPN XII Kebun Silosanen



Langkah I : Identifikasi Masalah

Terjadi ketimpangan relasi gender masyarakat di Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen, dimana terdapat Perbedaan Kontrol dan Akses antara perempuan dan laki-laki, di ranah domestik maupun diruang publik, termasuk di tempat mereka bekerja di perkebunan.

Tabel 5.7
Perbedaan Akses dan Kontrol

Sumberdaya	Akses		Kontrol	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tanah	v	v	v	
Peralatan	v	v	v	
Uang kas	v	v	v	v
Sarana dan prasarana	v	v	v	
Pendapatan dari luar	v	v	v	
Pemilikan properti	v		v	
Kebutuhan dasar	v	v	v	
Pendidikan	v	v	v	
Pelatihan	v		v	
Kekuasaan politis/prestise	v		v	
Fasilitas kesehatan	v	v	v	
Peluang jabatan	v		v	
Gaji	v	v	v	
Tunjangan	v		v	
Cuti dengan tetap digaji				
Kredit	v		v	
Keselamatan/kenyamanan kerja	v	v	v	

Sumber: diolah dari data primer

Tabel 5.8

Faktor yang mempengaruhi perbedaan akses dan kontrol

No	Faktor	Hambatan
1	Politik	Penentu kebijakan di semua tingkatan didominasi oleh laki-laki, sehingga, produk kebijakannya pun tidak sensitif gender.
2	Ekonomi	Sistem ekonomi yang kapitalistik menempatkan perempuan dalam keluarga sebagai aset yang dimiliki oleh laki-laki.
3	Sosial	Masyarakat menganggap berada dibawah tanggungjawab laki-laki, sehingga keputusan atau pemikiran laki-laki dianggap juga mewakili kebutuhan dan kepentingan perempuan.
4	Budaya	Ketidakadilan yang dialami perempuan akibat relasi antara laki-laki dan perempuan yang timpang dimasyarakat dianggap sebagai kewajaran dan bersifat kodrati.
5	Hukum	ada aturan dan produk perundangan-undangan yang melindungi hak-hak perempuan, namun tidak disertai perangkat yang memadai, seperti halnya pemahaman yang masih bias diantara penegak hukum dan terlebih lagi bagi masyarakat.

Sumber : diolah dari data primer

Terdapat perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki di masyarakat perkebunan, yang berpengaruh terhadap aktifitas yang dilakukan laki-laki dan perempuan.

Tabel.5.9**Aktifitas Reproduksi masyarakat perkebunan**

Jenis Aktifitas Reproduksi	Laki-laki	Anak laki2	perempuan	Anak perempuan
mengasuh anak			v	
memasak,			v	v
mencuci perabot dapur			v	v
mengambil air,			v	
mengambil kayu bakar,		v	v	v
mencuci baju,			v	v
menyetrika baju,			v	v
membersihkan rumah,		v	v	v
membantu belajar anak	v		v	
Belanja keperluan sehari-hari			v	
Mengantar anak sekolah			v	
Memperbaiki rumah	v	v		
Merawat anggota keluarga yang sakit	v		v	v
Mengantar ke klinik/puskesmas/posyandu	v		v	
Mencari/membuat obat alamiah/jamu			v	

Sumber : diolah dari data primer

Tabel 5.10
Aktifitas Produktif Buruh Perkebunan

Jenis Aktifitas Produktif	Laki-laki	perempuan
Pembibitan		v
Pemupukan	v	v
Dangir/menyiangi rumput	v	v
Memotong/merapikan cabang	v	
Pemetikan	v	v
Penyortiran		v
Buat lubang tanaman baru,	v	
Timbang	v	
Operator mesin pabrik	v	
Pemeliharaan peralatan pabrik	v	
Mencari rumput untuk sapi/kambing	v	v
Merawat sapi/kambing	v	v
Menanam sayur/buah di pekarangan		v

Sumber : diolah dari data primer

Tabel 5.11
Aktifitas Kemasyarakatan

Aktifitas Kemasyarakatan	Laki-laki	Anak laki-laki	perempuan	Anak perempuan
Perkawinan	v	v	v	v
Pemakaman	v	v	v	v
Dasa wisma	v		v	
Pengajian	v		v	
PKK			v	
Posyandu			v	
Peringatan hari besar/selamatan	v		v	
Rapat desa/RT/RW	v			

Sumber : diolah dari data primer

Relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan berdampak bagi kehidupan perempuan di perkebunan, berupa tidak terjaminnya hak-hak perempuan, yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Pelanggaran Hak-hak Perempuan

Bentuk pelanggaran	Hak yang dilanggar	Ketentuan yang dilanggar
<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan buruh kebun Silosanen tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan • Tidak memiliki peluang untuk dipilih dalam pemilihan berkala • Keterbatasan peluang untuk masuk dan berkontribusi dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah 	Hak politik	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 21 UDHR butir 1 dan 2 • Pasal 25 ICCPR • Pasal 7 dan 8 CEDAW • Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan.
<ul style="list-style-type: none"> • perempuan buruh perkebunan tidak memiliki peluang mendapatkan pendidikan dan pengajaran 	Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 26 (1) UDHR • Pasal 10 CEDAW, • Pasal 13 ayat (2) ICESCR • Pasal 4 (d) Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan.
<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan buruh kebun Silosanen tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan • Perempuan buruh juga mendapatkan upah rendah, • tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya 	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 25 (1), (2) Deklarasi Universal HAM (UDHR) • Pasal 11 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) • Pasal 23 DUHAM, • Pasal 6 ayat (1), 7 dan Pasal 8 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan

<ul style="list-style-type: none"> • tidak mendapatkan pelatihan • tidak mendapatkan pesangon ketika berhenti bekerja 		Budaya, <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 11 CEDAW, • Pasal 3 ICCPR • Konvensi ILO tentang Upah yang Setara, 1951 (No.100)
<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan buruh kebun tidak mendapatkan perlindungan kesehatan berkaitan dengan fungsi reproduksinya. • Mereka tinggal di lingkungan yang tercemar dengan sampah dari rumah tangga, tidak adanya jamban di rumah mereka. 	Hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 25 (2) UDHR • Pasal 12 ayat (1) ICESCR • Pasal 11 butir (f), Pasal 12 dan Pasal 14 CEDAW. • Konvensi ILO tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, 1981 (No.156), • Konvensi ILO tentang Perlindungan Kehamilan, 2000 (No.183)
<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan terdiskriminasi di tempat kerja • Perempuan buruh perempuan mendapatkan ancaman kekerasan dan kekerasan di rumah dan di tempat kerja • Perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan laki-laki 	Hak untuk diperlakukan secara adil	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 UDHR • Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR. • Pasal 2 dan 15 CEDAW • Konvensi ILO tentang anti Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No.111),

Sumber : diolah dari data primer

Sedangkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan buruh perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen berupa :

- a. Marginalisasi ekonomi, dimana para perempuan buruh perkebunan kesulitan untuk mengakses jenis pekerjaan tertentu yang dianggap strategis di perusahaan perkebunan. Sedangkan di dalam keluarganya sendiri, aset-

aset keluarga seringkali hanya bisa dikontrol oleh laki-laki yang menjadi kepala keluarga.

- b. Subordinasi, perempuan selalu menempati posisi subordinat di dalam lingkup domestik, dimasyarakat, termasuk ditempat mereka bekerja. Sehingga perempuan akhirnya tidak punya pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri.
- c. Beban ganda, selain menjadi ibu rumahtangga yang harus mengurus semua pekerjaan rumahtangga, perempuan masih harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Ditambah lagi dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang juga melibatkan perempuan untuk hal-hal tertentu.
- d. Stereotype, anggapan negatif terhadap perempuan juga menghambat perempuan dalam menjalankan aktifitasnya. Perempuan yang selalu dianggap lemah, tidak bisa mengakses jenis pekerjaan tertentu, tidak boleh menjadi pemimpin di masyarakat, dan bahkan seringkali diperlakukan tidak sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.
- e. Kekerasan. Kekerasan yang dialami perempuan buruh perkebunan terjadi di dalam rumah maupun di ruang publik. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk perempuan, ternyata justru menjadi tempat yang paling sering terjadi kekerasan, yang dilakukan oleh suami, maupun oleh orangtua, dan orang terdekat lainnya. Sedangkan diruang publik, dalam hal ini ditempat kerja, buruh perkebunan, baik yang bekerja di kebun ataupun di pabrik seringkali mengalami kekerasan verbal berupa umpatan, bahkan beberapa bentuk kekerasan langsung seperti pelecehan seksual.

Langkah II : Persiapan

Langkah persiapan ini dilakukan oleh penyelenggara bersama dengan beberapa perempuan dan atau laki-laki buruh perkebunan yang bisa menjadi tokoh kunci dalam proses pemberdayaan perempuan berbasis kebutuhan strategis gender yang dilaksanakan di Kebun Silosanen. Tahapan yang dilakukan yakni :

1. Pemetaan masalah dari sudut pandang perempuan dan laki-laki, untuk menemukan persoalan yang betul-betul dimiliki oleh buruh perempuan perkebunan yang merupakan konstituen pengorganisasian. Pemetaan masalah bisa dimulai dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi pada Langkah I, dengan menggunakan pohon masalah untuk selanjutnya bisa menemukan akar permasalahannya.
2. Analisis bersama untuk pengenalan potensi masyarakat (laki-laki dan perempuan), merupakan upaya mengidentifikasi dan mengumpulkan kekuatan dan kemampuan ko-instituen yang menjadi obyek pengorganisasian untuk bisa mengadvokasi dirinya sendiri.
3. Membangun kesadaran awal, dimana proses peningkatan kesadaran perempuan, sebagai korban dalam hal ini diperlukan untuk membangkitkan semangat untuk perubahan. Sedangkan kesadaran gender dari pihak laki-laki diperlukan untuk membangun semangat empati dan berbagi beban dengan perempuan yang dalam hal ini menjadi istri atau anaknya, atau menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat secara umum.
4. Penyatuan gagasan dan ide diantara laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam proses pemberdayaan, agar terbangun keselarasan langkah berikutnya.
5. Perumusan tujuan bersama yang mengacu kepada kebutuhan strategis gender laki-laki dan perempuan. Tujuan bersama ini berupa situasi dan kondisi masyarakat yang adil dan responsif gender, sehingga berdampak kepada peningkatan kualitas hidup laki-laki dan perempuan secara setara di masyarakat PTPN XII Kebun Silosanen Jember.

Langkah III : Sekolah Perempuan Berdaya

1. Metode

Metode dalam sekolah perempuan berdaya ini adalah partisipatoris, dimana dalam proses belajar yang melibatkan elemen-elemen:

- a. Menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri.

- b. Menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif
- c. Diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik
- d. Merumuskan tujuan-tujuan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar
- e. Merencanakan pola pengalaman belajar
- f. Melakukan dan menggunakan pengalaman belajar ini dengan metoda dan teknik yang memadai
- g. Mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan-kebutuhan belajar. (<http://www.kemsos.go.id>)

2. Peserta

Peserta sekolah perempuan berdaya ini diprioritaskan bagi perempuan buruh Perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen. Pada tahap awal, tidak disertakan laki-laki dengan pertimbangan, bahwa dalam kultur yang masih patriarkhis, perempuan akan tetap subordinan ketika berada dalam forum yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, perlu dibangun terlebih dahulu kepercayaan diri perempuan, dan kesadaran mereka akan kesetaraan yang sebenarnya harus terwujud dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Untuk tahap selanjutnya akan disertakan laki-laki yang merupakan keluarga, dalam hal ini suami para buruh perempuan, aparat desa, juga pihak administrator perusahaan. Ini menjadi penting, mengingat untuk mengubah sistem yang ada agar lebih adil gender, diperlukan bukan hanya kesadaran perempuan, tetapi juga laki-laki.

3. Materi

- a. Gender dan kesetaraan
- b. Ketidakadilan gender
- c. Hak-hak perempuan
- d. Manajemen konflik
- e. Problem solving
- f. Analisis sosial dan SWOT
- g. Advokasi

4. Fasilitator

Fasilitator merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pemberdayaan ini. Oleh karenanya diperlukan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh fasilitator, diantaranya adalah :

- a. Memiliki komitmen dan empati terhadap proses pemberdayaan perempuan
- b. Memiliki kemampuan untuk membantu dan mengembangkan suasana bersahabat, informal dan santai
- c. Mampu menciptakan suasana demokratis dan kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut.
- d. Mampu mengembangkan semangat kebersamaan diantara warga belajar
- e. Menguasai dan mampu mentransfer materi/ pokok-pokok bahasan dari setiap sesi pertemuan.

5. Sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan sekolah pemberdayaan ini dibutuhkan modul Pemberdayaan Perempuan Perkebunan berbasis Kebutuhan Strategis Gender yang didalamnya telah memperinci berbagai materi, metode, dan media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga diperlukan media berupa : ATK, Kertas Plano, Papan Tulis, dan LCD Viewer

Langkah IV : Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi,serta keberhasilan proses pembelajaran, meliputi 2 hal, yakni (1) pelaksanaan sekolah secara kuantitas, meliputi jumlah pertemuan, jumlah peserta, ketersediaan media, sarana prasarana dan sebagainya. (2) Evaluasi terkait dengan hasil dari proses pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur perubahan pemikiran dan sikap, serta perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran / pelatihan. Tidak menutup kemungkinan evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta sekolah pemberdayaan itu sendiri. Sedangkan materi evaluasi ditetapkan

bersama secara partisipatif, meliputi keseluruhan pokok bahasan dalam sekolah perempuan berdaya.

Langkah V : Pengorganisasian

Pemberdayaan perempuan perkebunan ini adalah kegiatan yang berkelanjutan menuju kehidupan yang lebih adil gender. Merupakan proses membentuk kelompok perempuan buruh perkebunan menuju penguatan dan kemandirian untuk menyampaikan pendapat dan alternatif kebijakan, peningkatan akses dan kontrol, kemampuan berfikir kritis, adil dan demokratis yang berspektif gender dengan cara yang partisipatif. Pengorganisasian ini merupakan tindak lanjut dari proses pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Perempuan Berdaya.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengorganisasian ini adalah :

- Identifikasi pihak-pihak, masalah, analisis dampak dan ancaman
- Analisis potensi dan kebutuhan
- Pembagian peran sesuai analisis kebutuhan
- Membangun aliansi dengan berbagai kelompok yang lebih besar atau dengan publik yang lebih luas
- Menjalankan fungsi organisasi :
 - o Memelihara solidaritas perempuan perkebunan
 - o Membangun dan memelihara pertukaran informasi
 - o Membangun mekanisme perubahan sebagai upaya pencapaian pemberdayaan perempuan perkebunan.

Langkah VI : Perencanaan Program kelompok

- (1) mengidentifikasi spesifik issue yang akan dibawa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat dan terkait dengan posisi buruh dengan perusahaan
- (2) menentukan tujuan jangka panjang dan pendek organisasi, dimana tujuan yang baik adalah yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu

- (3) mengidentifikasi sumber dana dan sumber daya untuk mendukung gerakan, misalnya dengan pengumpulan dana dari pendukung, lembaga donor, maupun dari pemerintah.
- (4) menentukan siapa saja yang akan mengkoordinasi atau bertanggungjawab dalam setiap kegiatan, siapa saja yang akan berpartisipasi dalam gerakan/kegiatan organisasi
- (5) menentukan target perubahan, bisa tokoh atau pejabat dalam pemerintah, perusahaan atau masyarakat, dan atau apa kebijakan yang akan diubah dalam kegiatan tersebut.
- (6) menentukan aksi yang cocok untuk menciptakan perubahan dengan melihat sistem yang akan dipengaruhi
- (7) membuat timeline untuk melaksanakan kegiatan tersebut
- (8) menciptakan struktur gerakan yang lebih luas sesuai jalur koordinasi.

Langkah VII : Kegiatan kelompok

Pelaksanaan kegiatan kelompok ditentukan bersama saat perencanaan program organisasi. Kegiatan-kegiatan organisasi akan bermuara kepada perubahan masyarakat, yang bisa diwujudkan dengan :

- a. penentuan prioritas kegiatan
- b. merencanakan waktu, disesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki buruh perempuan PTPN XII Kebun Silosanen
- c. penyediaan alat pemantauan dan evaluasi, berupa matriks kegiatan yang dilengkapi dengan target, waktu, dan indikator.

Langkah VIII : Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pada tahap ini adalah untuk melihat keberhasilan ataupun kegagalan dalam keseluruhan proses pengorganisasian. Dalam hal ini digunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif.

1. Kualitatif

Secara kualitatif pengorganisasian perempuan buruh Perkebunan Silosanen ini berhasil jika ada indikator :

- a.** Peningkatan kontrol perempuan dalam kehidupan di lingkup domestik maupun di ruang publik
- b.** Peningkatan partisipasi dalam setiap rangkaian proses pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sampai kepada manfaat yang bisa dinikmati bersama-sama dengan laki-laki
- c.** Perubahan pola pikir perempuan dan tumbuhnya kesadaran kritis perempuan untuk mengubah kondisi yang timpang menjadi lebih adil gender.
- d.** Semakin banyak akses yang dimiliki perempuan terhadap sumberdaya, informasi, dan fasilitas-fasilitas lain baik, yang tersedia di alam, masyarakat, maupun yang disediakan oleh negara.
- e.** Peningkatan kesejahteraan perempuan yang ditandai dengan terjaminnya hak-hak perempuan, terutama hak untuk hidup layak.

2. Kwantitatif

Secara kuantitatif, indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan proses pemberdayaan ini adalah :

- a.** Terbentuknya organisasi perempuan buruh perkebunan
- b.** Jumlah anggota yang terus bertambah
- c.** Tersusunnya rencana kegiatan organisasi
- d.** Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi

Tabel 5.13
Kerangka evaluasi pemberdayaan perempuan buruh perkebunan berbasis
kebutuhan strategis gender

Kondisi awal sebelum pemberdayaan		Proses pemberdayaan (sekolah perempuan berdaya dan pengorganisa- sian)	Kondisi setelah pemberdayaan	
Pembedaan kontrol Pembedaan akses Pembedaan peran Pembedaan hak	Tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan		Pembedaan kontrol Pembedaan akses Pembedaan peran Pembedaan hak	Seimbang antara laki-laki dan perempuan
Partisipasi Kesadaran kritis kesejahteraan	rendah	Partisipasi Kesadaran kritis kesejahteraan	meningkat	

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Penelitian ini telah berhasil merumuskan sebuah model pemberdayaan perempuan yang spesifik untuk masyarakat perkebunan kopi PTPN XII Silosanen Jember. Rencana selanjutnya dari kegiatan ini adalah melanjutkan proses pemberdayaan perempuan buruh perkebunan PTPN XII Silosanen dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menerapkan Modul Pemberdayaan Perempuan berbasis Kebutuhan Strategis Gender yang merupakan luaran penelitian ini.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Perempuan di wilayah perkebunan kopi PTPN XII Kebun Silosanen belum bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh semua warga negara. Hak untuk mengembangkan diri, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas kepastian hukum dan keadilan belum didapatkan oleh perempuan buruh PTPN XII Silosanen.

Mereka juga mengalami ketidakadilan berupa marginalisasi dalam bidang ekonomi. Juga subordinasi, dimana perempuan selalu ditempatkan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki. Buruh perempuan juga harus menanggung beban ganda, berupa tugas-tugas dalam rumahtangga, dimana mereka harus menjalankan fungsi reproduksi, sekaligus ikut dalam aktifitas produktif untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Anggapan-anggapan negative berupa stereotype terhadap perempuan juga membuat kondisi perempuan lebih terpuruk. Ditambah dengan berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan di lingkup domestik maupun ketika mereka berada di ruang publik.

Kondisi ketidakberdayaan perempuan buruh di masyarakat perkebunan dengan berbagai indikator tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pemahaman doktrin-doktrin agama tentang relasi gender yang masih bias laki-laki dan hegemonik. (2) Rendahnya tingkat pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki pada umumnya. (3) Masih kuatnya hegemoni kultur patriarkhi dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. (4) belum adanya program-program aksi pemberdayaan perempuan yang berbasis kepada kebutuhan strategis gender.

Terkait dengan hal diatas, model pemberdayaan yang cocok untuk perempuan buruh perkebunan PTPN XII Silosanen adalah melalui sekolah perempuan berdaya dan pengorganisasian. Sekolah perempuan berdaya diharapkan akan mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, baik

perempuan maupun laki-laki untuk lebih sensitif gender. Sedangkan perorganisasian dibutuhkan sebagai langkah yang strategis untuk menjadi wadah bagi perempuan buruh kebun, untuk melakukan diskusi-diskusi dan sharing dalam upaya membangun kesadaran gender, dan sekaligus sebagai alat bargain terhadap pihak perkebunan, perusahaan, maupun di masyarakat.

7.2 Saran

Untuk menciptakan perubahan relasi antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi setara di masyarakat perkebunan, maka perempuan buruh kebun perlu mendapatkan pendidikan yang mencerahkan, sehingga mereka menyadari pentingnya kekuasaan untuk mengontrol kehidupannya, mendapatkan akses terhadap sumberdaya dan informasi.

Program pemberdayaan perempuan perkebunan berbasis kebutuhan strategis gender ini adalah program jangka panjang yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait, yakni masyarakat, laki-laki dan perempuan, ormas, orsospol, aparat desa, dan pemerintah. Untuk itu menjadi penting melibatkan berbagai pihak dalam proses sekolah perempuan berdaya maupun pengorganisasian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk perbaikan hidup masyarakat yang lebih berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Claros, Augusto Lopez dan Zahidi, Saadia. 2005. *Woman Empowerment : Measuring The Global Gender Gap*. World Economic Forum. Diakses dari situs : www.weforum.org, pada 11 Maret 2013
- Darwin, Muhadjir, M, 2005, Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik, Media Wacana, Yogyakarta.
- Demartoto, Argyo dan Budiati, Atik Catur. 2010, *Analisis Kebutuhan Gender (Kajian Mengenai Pembekalan TKW yang akan Dikirim Ke Luar Negeri dalam rangka Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Kabupaten Karanganyar*), Laporan Penelitian, <http://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/penelitian-kajian-wanita.pdf>, diakses pada 10 Maret 2013
- Erawaty, Emy, 1995, *Sistem Jaringan Kerja Karyawan Harian Lepas Wanita dan Aspek Kehidupannya* .Skripsi (S-1) Tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Fakih, Mansour. 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Marwanti, Sri dan Astuti, Ismi Dwi. 2012, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Karanganyar*, Jurnal SEPA : vol. 9 no.1, September 2012 :134–144
- Mazdalifah, 2007, *Kehidupan Buruh Perempuan Perkebunan Di Desa Sukaluwei, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Harmoni Sosial, September 2007, Volume II, No. 1, <http://mazdalifahjalil.wordpress.com/tag/kehidupan-buruh-perempuan-perkebunan/>
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mulyono, Joko. 2010. *Kebijakan pemberdayaan perempuan Melalui Kebutuhan Strategis dan Praktis Gender*, Jurnal Inspirat, Edisi 1, Tahun 1, Nomor 1, Januari-Juni
- Purwandari, Kristi. 2007, *Perspektif Feminis Menuju Keadilan Gender*, PSKW PPS UI, <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/pdf>, diakses pada 10 Maret 2013.
- Ratnawati, Susi. 2011, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan*, Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember
- Sabandari, Pinky. 2010, *Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan*, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, Volume 12, Nomor 2: 33- 38, November
- Simatauw, Meentje, dkk. 2001, *Gender dan Pengelolaan Sumberdaya Alam : Sebuah Panduan Analisis*, Yayasan PIKUL, Kupang

Subhan, Zaitunah, 2002, Menanggulangi Budaya Marjinalisasi di Perusahaan, dalam Mimif Hidayat dan Edi Junaedi (Ed): *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam*, Jakarta: El KAHFI
Pengarusutamaan Gender, Jurnal Perempuan, No 50 Tahun 2006, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Akses Internet

- Angka Kematian Ibu Makin Meningkat, 2012, <http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/04/24/angka-kematian-ibu-makin-meningkat/>, diakses pada 11 Maret 2013
- Angka Kemiskinan, http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02jan13.pdf, diakses pada 11 Maret 2013
- Beberapa Aliran Feminisme, 2009, <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2009/09/07/beberapa-aliran-feminisme>, diakses pada 10 Maret 2013
- BWI, 2012. Peran Perempuan Perkebunan Teh Rakyat Desa Mojotengah Dalam Sertifikasi Standar Teh Lestari, <http://ekonomi-hijau.org/content/peran-perempuan-perkebunan-teh-rakyat-desa-mojotengah-dalam-sertifikasi-standar-teh-lestari> diakses pada 10 Maret 2013
- Data BPS Jatim, 2012, http://jatim.bps.go.id/tables/2012/pertanian/tabel_6.2.3.pdf..2011, diakses pada 11 Maret 2013
- Data BPS, 2011, <http://www.bps.go.id/>, diakses pada 11 Maret 2013
- Data Disbun Jatim 2013, Tenaga kerja, <http://www.disbun.jatimprov.go.id/tenagakerja.php>, diakses pada 11 Maret 2013
- Data Disbun Jatim, 2012, Pendapatan Petani, <http://www.disbun.jatimprov.go.id/pendapatanpetani.php>, diakses pada 11 Maret 2013
- Data Disbun, 2011, Data Komoditi Kopi, http://www.disbun.jatimprov.go.id/komoditi_kopi.php, diakses pada 11 Maret 2013
- Data KPU, 2009, www.kpu.go.id, Diakses pada 11 Maret 2012
- Departemen Kehutanan, 2005, *Pengarusutamaan Gender Lingkup Departemen Kehutanan*, Jakarta : Departemen Kehutanan
http://repository.upi.edu/operator/upload/s_sej_022470_chapter5.pdf, diakses pada 11 Maret 2013
- Kabupaten Jember Masuk 8 Besar kabupaten Dengan Angka Kematian Ibu dan Bayi Tertinggi di Jawa Timur, 2012, <http://kissfmjember.com/2012/12/20/kabupaten-jember-masuk-8-besar-kabupaten-dengan-angka-kematian-ibu-dan-bayi-tertinggi-di-jawa-timur.html>.
- Kebutuhan Gender, <http://genderpedia.blogspot.com/2010/08/kebutuhan-gender.html>, diakses pada 10 Maret 2013

Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender, 2010,
<http://sulbar.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=104&ContentTypelId=0x01003DCA BABC04B7084595DA364423DE7897>

PTPN XII Silosanen,
<http://www.disbun.jatimprov.go.id/dbdata/dwnlad/stakeholder/ptpnxiwiiii/PTPN%20XII%20WIL%20II-UUS%20Silosanen.pdf>, diakses pada 11 Maret 2013

Sejarah feminisme dan Aliran-alirannya, 2008,
<http://reyrey.blog.friendster.com/2008/02/sejarah-feminisme-aliran2nya>,
diakses pada 10 Maret 2013
<http://www.kemsos.go.id//modules.php?name=News&file=article&sid=209>

Lampiran

Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Drs.M.Nur Hasan, M.Hum
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	195904231987021001
5	NIDN	0023045910
6	Tempat/tgl lahir	Lamongan, 23 april 1959
7	E-mail	mnurhasan56@yahoo.com
8	Nomor HP	081336716725
9	Alamat Kantor	Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Jember
10	No Telp/Faks	(0331) 335586
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 100 orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Filsafat Ilmu dan Etika akademik 2. Gerakan Sosial 3. Politik Pemerintahan Timur Tengah 4. Politik Luar Negeri Amerika Serikat 5. Pengantar Antropologi Budaya

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jember	Universitas Indonesia	
Bidang Ilmu	Ilmu HI	Filsafat	
Tahun masuk-lulus	1980-1985	1998-2002	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Defungsionalisasi Pasukan Multinasional di Libanon	Visi Sosial dan Moral Politik NU dalam upaya Pemberdayaan Civil Society	
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Bariman	Dr. Agus Nugroho	

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kebutuhan strategis Gender (Studi Kasus di Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen Jember)	BOPTN UNEJ	36

2	2009	Pemetaan Kekerasan bernuansa Agama di Jatim	CMARS-YPSM	50
---	------	---	------------	----

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Pelatihan kader Lanjutan Peningkatan kapabilitas Perempuan Untuk kemandirian dalam Kehidupan Bermasyarakat	Mandiri	10

G. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Perempuan Buruh Perkebunan, Paradigma Pemberdayaan & Realitas Ketidakadilan	2013	143	Deka Publishing
2	Ijtihad Politik NU	2010		Manhaj Yogyakarta

Biodata Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Drs.Djoko Susilo, M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	195908311989021001
5	NIDN	0031085909
6	Tempat/tgl lahir	Kediri, 31 Agustus 1959
7	E-mail	
8	Nomor HP	08123489685
9	Alamat Kantor	Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Jember
10	No Telp/Faks	(0331) 335586
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 110 orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Politik Luar negeri Indonesia 2. Politik Pemerintahan Negara-negara Eropa 3. Metodologi Penelitian 4. Politik Pemerintahan Negara-negara Amerika Latin

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jember	Universitas Padjajaran	
Bidang Ilmu	Ilmu HI	Komunikasi	
Tahun masuk-lulus	1981-1987	1989-2001	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Islamisasi Politik di Pakistan Masa Pemerintahan Zia Ulhaq	Pengaruh Pelayanan Jaminan Pemeliharaan	

		Kesehatan terhadap Sikap Peserta Askes	
Nama Pembimbing/Promotor	Drs Bariman	Dr. Barita Siregar	

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kebutuhan strategis Gender (Studi Kasus di Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen Jember)	BOPTN UNEJ	36
2	2009	Publik Opini sebagai Cermin Demokrasi	Mandiri	10
3	2008	Pola Penggunaan Media Televisi dan Perilaku Konsumtif Remaja di Jember	DP3M Dikti	10

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Pelatihan kader Lanjutan Peningkatan kapabilitas Perempuan Untuk kemandirian dalam Kehidupan Bermasyarakat	Mandiri	10

G. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Perempuan Buruh Perkebunan, Paradigma Pemberdayaan & Realitas Ketidakadilan	2013	143	Deka Publishing

Biodata Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, M.A
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	197708102006042003
5	NIDN	0010087712
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Blitar, 10 Agustus 1977
7	E-mail	elindadwi@yahoo.com
8	Nomor HP	081328763945
9	Alamat Kantor	Kampus Bumi Tegal Boto, Jl Kalimantan Jember

10	Nomor Telepon/Faks	0331-335568
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 5 orang
	Mata Kuliah yg diampu	1. Studi Keamanan dan Resolusi Konflik 2. Regionalisme 3. Studi Keamanan dan Strategi 4. Gerakan Sosial 5. Filsafat Ilmu dan Etika Akademik 6. Pancasila 7. Ilmu Sosial Budaya Dasar

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama PT	Univ.Jember	UGM	
Bidang Ilmu	Ilmu Hubungan Internasional	Ilmu Hubungan Internasional	
Tahun Masuk - lulus	1995 - 2000	2009 - 2011	
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Peran Pers Sebagai Pressure Group Riil di Indonesi Pasca Orde Baru	Aspek Gender dalam pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan	
Nama Pembimbing/ Promotor	Drs Nuruddin M Yasin	Dr Eric Hiariej, M.Phil	

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kebutuhan strategis Gender (Studi Kasus di Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen Jember)	BOPTN UNEJ	36
2	2013	PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) : Analisis Kekerasan dan Strategi Pencegahan	BOPTN UNEJ	8,280
1	2008	Relasi Kekuasaan Dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang Publik (Analisis Terhadap Sumberdaya, Motif Dan Strategi Aktor Dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang Publik Di Kabupaten Jember)	PDM- DIPA	5 juta
2	2009	Peran Ormas Islam Perempuan dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan	Yayasan RAHIMA	10 juta

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Pelatihan Kader Lanjutan Peningkatan Kapabilitas Perempuan Untuk Kemandirian dalam Kehidupan Bermasyarakat	Mandiri	10
2	2012	Pelatihan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.	Mandiri	10
3	2010	Pelatihan Ketrampilan Handicraft	Fatayat NU Jember	10
4	2009	Penyuluhan perawatan Gigi Ibu Hamil	Dinkes Kab. Jember	10
5	2009	Life Skill untuk Perempuan anggota Fatayat NU Jember	Depdiknas bekerjasama dengan Fatayat NU Jember	87
6	2008	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Perempuan	BKKBN	15
7	2007/2008	Keaksaraan Fungsional bagi Kelompok Perempuan	Depdiknas bekerjasama dengan Fatayat NU Jember	137

F. Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan	Peran Politik Perempuan dan Demokratisasi di Indonesia	2012, Panorama Hotel Jember
2	Seminar Eliminasi Eksploitasi Perempuan dan Anak	Konstruksi Gender sebagai akar Permasalahan Eksploitasi	2011, Aula Stain Jember
3	Seminar Penjaminan HAM di Indonesia	Perempuan dan Penjaminan HAM di Indonesia	2010, Aula Kantor NU Jember
4	Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan dengan Kebijakan Responsif Gender	Advokasi Perempuan dalam mewujudkan Kebijakan Responsif Gender	2009, Aula PEMKAB Jember
5	Kekerasan Terhadap	Menyoal Solusi Kekerasan terhadap	2009, Aula PP

	Perempuan, Solusi dan Pencegahan	Perempuan	NURIS Jember
6	Pengarusutamaan Gender	Kontribusi Ormas Perempuan dalam kebijakan PUG	2008, Aula PGAN Jember

G. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Perempuan Buruh Perkebunan, Paradigma Pemberdayaan & Realitas Ketidakadilan	2013	143	Deka Publishing
2	Isu-isu Global dalam Perspektif Feminisme	2012	160	Deka publishing

Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kebutuhan Strategis Gender

(Studi Kasus di Perkebunan Kopi PTPN XII Slosanen Jember)

Oleh : Drs M Nurhasan, M.Hum, Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, MA, Drs Djoko

Susilo, M.Si

Abstract

This qualitative research aims to describes the strategic gender needs in the community PTPN XII Kebun Silosanen worker. The specific objectives of this research is to find a model of women empowerment based on gender strategic needs. The site chosen for this research is Silosanen coffee plantations managed by PTPN XII Silo Jember, which is 1479 labour in this plantations. Data collection methods used were interview, observation, literature, documentation studies and focus group discussion (FGD). Outcomes this Research will be published in a national journal, and manuals / modules plantation women's empowerment. From the present study found a suitable model of empowerment for women plantation workers. The model consist are women empowerment education and organizing women plantation workers. Women empowerment education intended as an effort to build the women labour critical awareness, than organizing as follow-up plan in the empowerment process.

Keywords: Model, Women's Empowerment, Gender Strategic Needs, Organizing, Women education, critical awareness.

PENDAHULUAN

Ketidaksamaan akses terhadap pendidikan, perekonomian, politik, dan kesehatan menjadikan perempuan tersisih dalam berbagai segi kehidupan. Berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah penduduk perempuan di Jawa Timur masih lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yakni 50,54%. Namun demikian, dalam kehidupannya kondisi perempuan tidak lebih baik dari laki-

laki. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia yang tinggal di Pedesaan 18,08 juta orang atau 14,70% pada September 2012, dan dari jumlah tersebut 70% diantaranya adalah perempuan. Sementara itu, di seluruh Indonesia, angka pengangguran terbuka perempuan juga lebih tinggi untuk kelompok umur 15-64 tahun yakni 7,63% dibanding 5,90% laki-laki yang menganggur. (BPS, 2011)

Konstruksi gender di masyarakat yang patriarkhis menempatkan perempuan pada posisi yang seringkali dirugikan. Perbedaan gender itu membawa dampak ketidakadilan bagi perempuan, yakni marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban ganda (Fakih, 2008). Marginalisasi dan subordinasi yang ada dimasyarakat dan dilegitimasi oleh negara dengan kebijakan yang tidak menganggap penting kebutuhan perempuan dan secara umum tidak berpihak pada perempuan telah mengakibatkan kemiskinan. Pelekatan stereotype negatif pada perempuan, mengakibatkan perempuan yang seringkali menjadi korban ketidakadilan, dan kekerasan justru dianggap sebagai pihak penyebab kekerasan. Bahkan oleh aparat pemerintah yang seharusnya menegakkan hukum untuk menjamin hak semua warganegara, termasuk perempuan. Kekerasan berupa pemerkosaan, pemukulan atau serangan fisik, penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi dan KB, kekerasan terselubung, pelecehan seksual, menimpa perempuan dari berbagai usia, berbagai kelas sosial, di ruang publik, bahkan di dalam rumahnya sendiri.

Perempuan yang bekerja diruang publik, karena masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan rumahtangga, maka ia harus menanggung beban kerja ganda, yakni tetap mengurus rumah tangga, dan masih harus bersaing dengan laki-laki di wilayah public dengan system yang masih menguntungkan laki-laki.

Sementara itu kehidupan perempuan yang tinggal di wilayah perkebunan juga tidak lepas dari permasalahan yang muncul akibat ketimpangan relasi gender. Para tenaga kerja perkebunan, termasuk perempuan di perkebunan, sangat tergantung kepada perkebunan, maka secara tidak langsung kelangsungan hidup mereka sangat dipengaruhi oleh produktivitas di perkebunan begitu juga sebaliknya. Perkebunan juga sangat membutuhkan buruh yang murah untuk menjalankan produksinya. Peran ganda buruh perempuan perkebunan, baik sebagai buruh dan ibu rumah tangga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kehidupan sosial ekonominya.(<http://repository.upi.edu>)

Model pemberdayaan perempuan yang selama ini ada belum menyentuh kebutuhan strategis gender perempuan. Kebutuhan strategis gender muncul dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat dan terkait dengan pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol. (<http://sulbar.bkkbn.go.id>). Kebutuhan strategis gender tidak lagi berorientasi pada bagaimana seseorang bias menjalankan fungsi sesuai tugas dan peran gender masing-masing. Tetapi lebih kepada upaya membangun kesetaraan gender sehingga ketika akses dan kontrol terhadap kehidupan bagi perempuan dan laki-laki terbuka secara sama, maka kebutuhan praktis genderpun akan terpenuhi.

Pendekatan pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Indonesia dalam rangka peningkatan peran perempuan menurut Hubeis (2010) adalah:

7. Pendekatan kesejahteraan : pengembangan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga atau pemenuhan kebutuhan praktis gender perempuan yang terkait dengan pelaksanaan peran reproduksi (domestik) perempuan.
8. Pendekatan penyamaan hak : diarahkan pada upaya kesamaan pengembangan peran perempuan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan seperti halnya laki-laki. Pelaksanaannya dengan pemenuhan kebutuhan strategis gender yang memperhatikan tiga peran perempuan yakni peran produktif, reproduktif dan peran sosial.
9. Pendekatan anti kemiskinan : pemenuhan kebutuhan praktis gender yang dikaitkan dengan keperluan perempuan untuk meningkatkan peran produktifnya. Kegiatan usaha kecil yang memungkinkan perempuan memperoleh pendapatan.
10. Pendekatan efisiensi : adanya jaminan terjadinya proses pembangunan yang lebih efektif dan efisien, kontribusi perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi.
11. Pendekatan penguatan : upaya pemempudayaan perempuan untuk mandiri. Subordinasi perempuan bukan hanya karena ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki tetapi juga sebagai akibat penindasan kolonial dan neokolonial. Pemenuhan kebutuhan strategis gender dilakukan dengan mobilisasi dari bawah keatas, sedangkan pemenuhan kebutuhan praktis gender diarahkan sebagai upaya melawan penindasan.

12. Pendekatan gender : kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan mencakup kebersamaan dalam berbagi pekerjaan rumahtangga, pengawasan sumberdaya dan kekuasaan, pengambilan keputusan keluarga terhadap penggunaan sumberdaya dan hasilnya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang dibayar, partisipasi politik, dan berbagi upah yang lebih adil (Hubeis, 2010).

Pemenuhan kebutuhan strategis perempuan dilakukan dengan berusaha mengatasi ketertinggalan perempuan di masyarakat dengan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan (Mulyono, 2010). Kebutuhan strategis gender merupakan kebutuhan jangka panjang yang bertujuan mengubah peran gender agar perempuan dan laki-laki dapat berbagi adil dalam pembangunan. (Demartoto dan Budiarti, 2010)

Kebutuhan strategis berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-laki, seperti perubahan pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan, kontrol terhadap sumber daya dan lain-lain. Kebutuhan strategis gender juga meliputi perubahan hak-hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi, persamaan upah, dan sebagainya (Dep. Kehutanan, 2005). Dengan demikian pemenuhan kebutuhan strategis merupakan program pemberdayaan perempuan dalam mematangkan potensi yang memungkinkan perempuan dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di peran publik (Subhan, 2002).

Sedangkan unsur utama dalam proses pemberdayaan perempuan menurut Naila Kabeer (2001, dikutip Claros and Zahidi, 2005: 2-5), terdiri dari : 1. *Welfare*

(Kesejahteraan) yang mencakup partisipasi ekonomi perempuan, pencapaian pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. 2. *Access* (Akses) terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan laki-laki. 3. *Consientisation* (Kesadaran) akan perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender. 4. *Participation* (Partisipasi), yakni partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. (Claros dan Zahidi, 2005: 4). 5. *Equality of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan), dimana kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

METODE PENELITIAN

Daerah penelitian ditentukan dengan sengaja pada daerah perkebunan kopi Silosanen yang dikelola PTPN XII di kecamatan Silo, yang penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1479 orang. (data Disbun, 2006)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : *Pertama*, Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi dilokasi penelitian dan hasil wawancara dengan purposive sampling dan metode snowball terhadap dinas terkait dengan pemberdayaan perempuan, Pengelola Perkebunan, LSM dan Ormas yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, perempuan dan laki-laki pekerja perkebunan, serta aparat desa setempat. *Kedua*, Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan dokumen) instansi terkait, pengumpulan literatur, karya-karya tulis serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta sifatnya mendukung data primer.

Analisis data mengikuti model interaktif analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1992), yakni melalui proses *Data reduction, Data Displays, Conclusion Drawing /Verification*. *Pertama*, reduksi data dilakukan semenjak pengumpulan data dengan penyederhanaan klasifikasi data kasar di lapangan. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. *Kedua*, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, interpelasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*spesifik*) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (*general*).

PEMBAHASAN

Kebutuhan Strategis Gender masyarakat di Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen

Hasil Penelitian tahun pertama telah berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Buruh Perkebunan kopi di PTPN XII

kebun Silosanen. Dari permasalahan tersebut diidentifikasi beberapa kebutuhan strategis gender bagi perempuan di wilayah perkebunan, yakni :

6. Kekuasaan/kontrol, yakni kemampuan untuk menentukan kegunaan dan fungsi atas sesuatu yang meliputi :
 - d. Sumberdaya, berupa sumberdaya alam (tanah, air, hutan), sumber Pengetahuan dan informasi (buku, TV, Radio, Koran), finansial (uang, properti)
 - e. Ideologi, dimana seorang atau golongan masyarakat seringkali menjadi penentu, dukun, ataupun dipercaya, yang akhirnya mengatur bahkan seringkali menentukan benar atau salah nilai-nilai dan cara pandang/cara berpikir warganya
 - f. Pasar, dengan memiliki kontrol atas pasar, berarti juga akan memiliki kendali atas sumberdaya alam dan uang.

7. Akses

Budaya yang berkembang di masyarakat patriarkhis berdampak kepada peluang yang dimiliki perempuan untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh keluarga, maupun yang ada dimasyarakat masih sangat terbatas

8. Kesadaran kritis

Hingga saat ini belum terbangun kesadaran diri perempuan akan kesetaraan gender, yang berdampak kepada perempuan tidak berusaha untuk mengubah struktur patriarkhi di masyarakatnya.

9. Partisipasi

Di satu sisi, perempuan mendapatkan beban ganda, dimana mereka harus bertanggungjawab atas semua urusan di dalam rumah tangga, dan masih harus ikut mencari nafkah untuk keluarga dan beraktifitas di masyarakat. Namun demikian perempuan tidak mendapatkan tempat dalam aktifitas yang terkait dengan pengambilan kebijakan baik diruang domestik, yakni dalam lingkup rumah tangga, maupun di ruang publik tatau dalam masyarakat. Hal ini berakibat banyak kebijakan di tingkat bawah sampai atas yang tidak sensitif gender.

10. Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan perempuan buruh perempuan masih sangat rendah, rata-rata hidup dibawah garis kemiskinan, dan dengan fasilitas hidup yang masih sangat terbatas. Mereka masih harus berhadapan dengan permasalahan marginalisasi ekonomi, subordinasi, stereotipe negatif, beban ganda dan kekerasan.

Oleh karenanya perlu ada perubahan dalam masyarakat di wilayah perkebunan kopi PTPN XII Kebun Silosanen yakni :

6. Perbaiki posisi perempuan terkait dengan sharing kekuasaan di keluarga maupun masyarakat
7. Pengubahan status gender, peningkatan akses dan kontrol terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, di lingkup domestik maupun di ruang publik.
8. Pembangunan keesadaran perempuan dan laki-laki atas pentingnya kesetaraan dalam kehidupan dalam keluarga dan di masyarakat.

9. Keikutsertaan perempuan dalam setiap proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring)
10. Pemenuhan kesejahteraan perempuan, yang akan terwujud ketika hak-haknya juga terjamin, yakni hak politik, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, hak untuk diperlakukan secara adil

Model Pemberdayaan Perempuan Perkebunan Berbasis Kebutuhan Strategis Gender

Pemberdayaan perempuan buruh perkebunan PTPN XII kebun Silosanen dilakukan dengan peningkatan kesadaran kritis atas hak, penguatan, pengalihan kekuasaan, peningkatan partisipasi, serta menumbuhkan keseimbangan relasi di antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut secara teknis berupa :

10.3.1. Sekolah Perempuan Berdaya

Sekolah perempuan ini adalah upaya untuk membuka wawasan dan memberikan pengetahuan kepada perempuan buruh perkebunan. Dengan sekolah Perempuan ini diharapkan akan terbangun pola pikir baru yang adil gender. Keadilan dan sensitifitas gender di masyarakat menjadi penting untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan, termasuk dalam pemenuhan-pemenuhan kebutuhan praktis perempuan.

Sekolah perempuan ini membutuhkan fasilitator yang memiliki pemahaman gender, pemahaman situasi dan kondisi perempuan di perkebunan Silosanen, juga

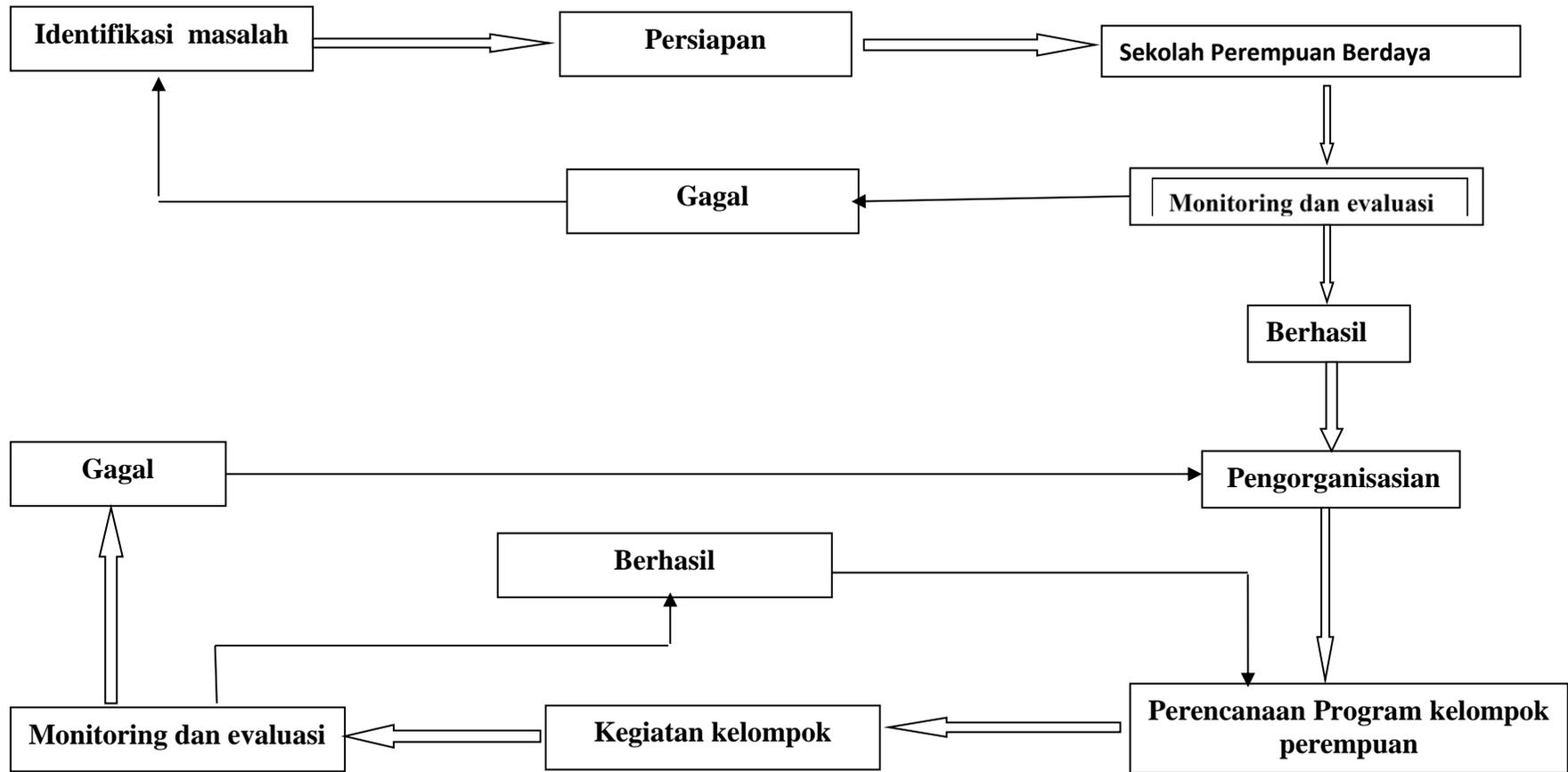
memiliki semangat pengabdian, komitmen, dan empati yang tinggi. Peserta sekolah Perempuan adalah buruh perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen, baik yang berasal dari buruh kebun, buruh pabrik, buruh bedeng, maupun mandor. Sekolah perempuan diselenggarakan secara rutin setiap dua minggu sekali, pada hari minggu selama 10 kali pertemuan.

10.3.2. Pengorganisasian buruh perempuan

Pengorganisasian buruh perempuan penting untuk menjadi wadah bagi perempuan buruh Perempuan. Organisasi buruh ini diharapkan mampu menjadi : (1) media bagi para anggotanya untuk berbagi informasi, (2) untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi, (3) Pencarian solusi bersama permasalahan yang ada, (4) sebagai media untuk menyebarkan kesadaran gender bagi perempuan di wilayah perkebunan PTPN XII kebun Silosanen, (5) wadah bagi perjuangan kepentingan kaum buruh ketika berhadapan dengan perusahaan.

Gambar 5.1

Model Pemberdayaan Perempuan Buruh Perkebunan Kopi PTPN XII Kebun Silosanen



Langkah I : Identifikasi Masalah

Terjadi ketimpangan relasi gender masyarakat di Perkebunan Kopi PTPN XII Silosanen, dimana terdapat Perbedaan Kontrol dan Akses antara perempuan dan laki-laki, di ranah domestik maupun diruang publik, termasuk di tempat mereka bekerja di perkebunan.

Tabel 5.7
Perbedaan Akses dan Kontrol

Sumberdaya	Akses		Kontrol	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tanah	v	V	v	
Peralatan	v	V	v	
Uang kas	v	v	v	v
Sarana dan prasarana	v	v	v	
Pendapatan dari luar	v	v	v	
Pemilikan properti	v		v	
Kebutuhan dasar	v	v	v	
Pendidikan	v	v	v	
Pelatihan	v		v	
Kekuasaan politis/prestise	v		v	
Fasilitas kesehatan	v	v	v	
Peluang jabatan	v		v	
Gaji	v	v	v	
Tunjangan	v		v	
Cuti				
Kredit	v		v	
Keselamatan/kenyamanan kerja	v	v	v	

Sumber: hasil wawancara

Tabel 5.8
Faktor yang mempengaruhi perbedaan akses dan kontrol

No	Faktor	Hambatan
1	Politik	Penentu kebijakan di semua tingkatan didominasi oleh laki-laki, sehingga, produk kebijakannya pun tidak sensitif gender.
2	Ekonomi	Sistem ekonomi yang kapitalistik menempatkan perempuan dalam keluarga sebagai aset yang dimiliki oleh laki-laki.
3	Sosial	Masyarakat menganggap berada dibawah tanggungjawab laki-laki, sehingga keputusan atau pemikiran laki-laki dianggap juga mewakili kebutuhan dan kepentingan perempuan.
4	Budaya	Ketidakadilan yang dialami perempuan akibat relasi antara laki-laki dan perempuan yang timpang dimasyarakat dianggap sebagai kewajaran dan bersifat kodrati.
5	Hukum	ada aturan dan produk perundangan-undangan yang melindungi hak-hak perempuan, namun tidak disertai perangkat yang memadai, seperti halnya pemahaman yang masih bias diantara penegak hukum dan terlebih lagi bagi masyarakat.

Sumber : hasil wawancara

Terdapat perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki di masyarakat perkebunan, yang berpengaruh terhadap aktifitas yang dilakukan laki-laki dan perempuan.

Tabel.5.9
Aktifitas Reproduksi masyarakat perkebunan

Jenis Aktifitas Reproduksi	Laki-laki	Anak laki2	perempuan	Anak perempuan
mengasuh anak			v	
memasak,			v	v
mencuci perabot dapur			v	v
mengambil air,			v	
mengambil kayu bakar,		v	v	v
mencuci baju,			v	v
menyetrika baju,			v	v
membersihkan rumah,		v	v	v
membantu belajar anak	v		v	
Belanja keperluan sehari-hari			v	
Mengantar anak sekolah			v	
Memperbaiki rumah	v	v		

Merawat anggota keluarga yang sakit	v		v	v
Mengantar ke klinik/puskesmas/posyandu	v		v	
Mencari/membuat obat alamiah/jamu			v	

Sumber : hasil wawancara

Tabel 5.10

Aktifitas Produktif Buruh Perkebunan

Jenis Aktifitas Produktif	Laki-laki	perempuan
Pembibitan		v
Pemupukan	v	v
Dangir/menyiangi rumput	v	v
Memotong/merapikan cabang	v	
Pemetikan	v	v
Penyortiran		v
Buat lubang tanaman baru,	v	
Timbang	v	
Operator mesin pabrik	v	
Pemeliharaan peralatan pabrik	v	
Mencari rumput untuk sapi/kambing	v	v
Merawat sapi/kambing	v	v
Menanam sayur/buah di pekarangan		v

Sumber : hasil wawancara

Tabel 5.11

Aktifitas Kemasyarakatan

Aktifitas Kemasyarakatan	Laki-laki	Anak laki-laki	perempuan	Anak perempuan
Perkawinan	v	v	v	v
Pemakaman	v	v	v	v
Dasa wisma	v		v	
Pengajian	v		v	
PKK			v	
Posyandu			v	
Peringatan hari besar/selamatan	v		v	
Rapat desa/RT/RW	V			

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Dampak relasi gender bagi kehidupan perempuan di perkebunan

Relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan berdampak kepada tidak terjaminnya hak-hak perempuan, diantaranya hak politik, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Sedangkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan buruh perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen berupa :

- f. Marginalisasi ekonomi
- g. Subordinasi
- h. Beban ganda
- i. Stereotype
- j. Kekerasan

Langkah II : Persiapan

Langkah persiapan ini dilakukan oleh penyelenggara bersama dengan beberapa perempuan dan atau laki-laki buruh perkebunan yang bisa menjadi tokoh kunci dalam proses pemberdayaan perempuan berbasis kebutuhan strategis gender yang dilaksanakan di Kebun Silosanen. Tahapan yang dilakukan yakni :

- 6. Pemetaan masalah dari sudut pandang perempuan dan laki-laki, untuk menemukan persoalan yang betul-betul dimiliki oleh buruh perempuan perkebunan yang merupakan konstituen pengorganisasian.
- 7. Analisis bersama untuk pengenalan potensi masyarakat (laki-laki dan perempuan), merupakan upaya mengidentifikasi dan mengumpulkan

kekuatan dan kemampuan koinstituen yang menjadi

obyekpengorganisasian untuk bisa mengadvokasi dirinya sendiri.

8. Membangun kesadaran awal, dimana proses peningkatan kesadaran perempuan, sebagai korban dalam hal ini diperlukan untuk membangkitkan semangat untuk perubahan.
9. Penyatuan gagasan dan ide
10. Perumusan tujuan bersama yang mengacu kepada kebutuhan strategis gender laki-laki dan perempuan

Langkah III : Sekolah Perempuan Berdaya

6. Metode

Metode dalam sekolah perempuan berdaya ini adalah partisipatoris, dimana dalam proses belajar yang melibatkan elemen-elemen:

- h. Menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri.
- i. Menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif
- j. Diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik
- k. Merumuskan tujuan-tujuan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar
- l. Merencanakan pola pengalaman belajar
- m. Melakukan dan menggunakan pengalaman belajar ini dengan metoda dan teknik yang memadai
- n. Mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan-kebutuhan belajar. (<http://www.kemsos.go.id>)

7. Peserta

Peserta sekolah perempuan berdaya ini diprioritaskan bagi perempuan buruh Perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen, tetapi dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan untuk mengikutsertakan laki-laki yang merupakan para suami mereka.

8. Materi

- a. Gender dan kesetaraan
- b. Ketidakadilan gender
- c. Hak-hak perempuan
- d. Manajemen konflik
- e. Problem solving
- f. Analisis sosial dan SWOT
- g. Advokasi

9. Fasilitator

Fasilitator merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pemberdayaan ini. Oleh karenanya diperlukan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh fasilitator, diantaranya adalah :

- a. Memiliki komitmen dan empati terhadap proses pemberdayaan perempuan
- b. Memiliki kemampuan untuk membantu dan mengembangkan suasana bersahabat, informal dan santai
- c. Mampu menciptakan suasana demokratis dan kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut.

- d. Mampu mengembangkan semangat kebersamaan diantara warga belajar
- e. Menguasai dan mampu mntransfer materi/ pokok-pokok bahasan dari setiap sesi pertemuan.

10. Sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan sekolah pemberdayaan ini dibutuhkan modul Pemberdayaan Perempuan Perkebunan berbasis Kebutuhan Strategis Gender yang didalamnya telah memperinci berbagai materi, metode, dan media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga diperlukan media berupa : ATK, Kertas Plano, Papan Tulis, dan LCD Viewer

Langkah IV : Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi,serta keberhasilan proses pembelajaran, meliputi 2 hal, yakni (1) pelaksanaan sekolah secara kuantitas, meliputi jumlah pertemuan, jumlah peserta, ketersediaan media, sarana prasarana dan sebagainya. (2) Evaluasi terkait dengan hasil dari proses pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur perubahan pemikiran dan sikap, serta perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran / pelatihan. Tidak menutup kemungkinan evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta sekolah pemberdayaan itu sendiri. Sedangkan materi evaluasi ditetapkan bersama secara partisipatif, meliputi keseluruhan pokok bahasan dalam sekolah perempuan berdaya.

Langkah V : Pengorganisasian

Pemberdayaan perempuan perkebunan ini adalah kegiatan yang berkelanjutan menuju kehidupan yang lebih adil gender. Merupakan proses membentuk kelompok perempuan buruh perkebunan menuju penguatan dan kemandirian untuk menyampaikan pendapat dan alternatif kebijakan, peningkatan akses dan kontrol, kemampuan berfikir kritis, adil dan demokratis yang berspektif gender dengan cara yang partisipatif. Pengorganisasian ini merupakan tindak lanjut dari proses pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Perempuan Berdaya.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengorganisasian ini adalah :

- Identifikasi pihak-pihak, masalah, analisis dampak dan ancaman
- Analisis potensi dan kebutuhan
- Pembagian peran sesuai analisis kebutuhan
- Bangun aliansi dengan berbagai kelompok yang lebih besar atau dengan publik yang lebih luas
- Menjalankan fungsi organisasi :
 - o Memelihara solidaritas perempuan perkebunan
 - o Membangun dan memelihara pertukaran informasi
 - o Membangun mekanisme perubahan sebagai upaya pencapaian pemberdayaan perempuan perkebunan.

Langkah VI : Perencanaan Program kelompok

- (9) mengidentifikasi spesifik issue yang akan dibawa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat dan terkait dengan posisi buruh dengan perusahaan
- (10) menentukan tujuan jangka panjang dan pendek organisasi, dimana tujuan yang baik adalah yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu
- (11) mengidentifikasi sumber dana dan sumber daya untuk mendukung gerakan, misalnya dengan pengumpulan dana dari pendukung, lembaga donor, maupun dari pemerintah.
- (12) menentukan siapa saja yang akan mengkoordinasi atau bertanggungjawab dalam setiap kegiatan, siapa saja yang akan berpartisipasi dalam gerakan/kegiatan organisasi
- (13) menentukan target perubahan, bisa tokoh atau pejabat dalam pemerintah, perusahaan atau masyarakat, dan atau apa kebijakan yang akan diubah dalam kegiatan tersebut.
- (14) menentukan aksi yang cocok untuk menciptakan perubahan dengan melihat sistem yang akan dipengaruhi
- (15) membuat timeline untuk melaksanakan kegiatan tersebut
- (16) menciptakan struktur gerakan yang lebih luas sesuai jalur koordinasi.

Langkah VII : Kegiatan kelompok

Pelaksanaan kegiatan kelompok ditentukan bersama saat perencanaan program organisasi. Kegiatan-kegiatan organisasi akan bermuara kepada perubahan masyarakat, yang bisa diwujudkan dengan :

- a. penentuan prioritas kegiatan
- b. merencanakan waktu, disesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki buruh perempuan PTPN XII Kebun Silosanen
- c. penyediaan alat pemantauan dan evaluasi, berupa matriks kegiatan yang dilengkapi dengan target, waktu, dan indikator.

Langkah VIII : Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pada tahap ini adalah untuk melihat keberhasilan ataupun kegagalan dalam keseluruhan proses pengorganisasian. Dalam hal ini digunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif.

3. Kualitatif

Secara kualitatif pengorganisasian perempuan buruh Perkebunan Silosanen ini berhasil jika ada indikator :

- f. Peningkatan kontrol perempuan dalam kehidupan di lingkup domestik maupun di ruang publik
- g. Peningkatan partisipasi dalam setiap rangkaian proses pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sampai kepada manfaat yang bisa dinikmati bersama-sama dengan laki-laki

- h.** Perubahan pola pikir perempuan dan tumbuhnya kesadaran kritis perempuan untuk mengubah kondisi yang timpang menjadi lebih adil gender.
- i.** Semakin banyak akses yang dimiliki perempuan terhadap sumberdaya, informasi, dan fasilitas-fasilitas lain baik, yang tersedia di alam, masyarakat, maupun yang disediakan oleh negara.
- j.** Peningkatan kesejahteraan perempuan yang ditandai dengan terjaminnya hak-hak perempuan, terutama hak untuk hidup layak.

4. Kwantitatif

Secara kuantitatif, indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan proses pemberdayaan ini adalah :

- e.** Terbentuknya organisasi perempuan buruh perkebunan
- f.** Jumlah anggota yang terus bertambah
- g.** Tersusunnya rencana kegiatan organisasi
- h.** Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi

Kesimpulan

Perempuan di wilayah perkebunan kopi PTPN XII Kebun Silosanen belum bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh semua warga negara. Hak untuk mengembangkan diri, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas kepastian hukum dan keadilan belum didapatkan oleh perempuan buruh PTPN XII Silosanen.

Mereka juga mengalami ketidakadilan berupa marginalisasi dalam bidang ekonomi. Juga subordinasi, dimana perempuan selalu ditempatkan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki. Buruh perempuan juga harus menanggung beban ganda, berupa tugas-tugas dalam rumahtangga, dimana mereka harus menjalankan fungsi reproduksi, sekaligus ikut dalam aktifitas produktif untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Anggapan-anggapan negative berupa stereotype terhadap perempuan juga membuat kondisi perempuan lebih terpuruk. Ditambah dengan berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan di lingkup domestik maupun ketika mereka berada di ruang publik.

Untuk itu perlu adanya perubahan relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat perkebunan. Perempuan buruh kebun perlu mendapatkan kekuasaan untuk mengontrol kehidupannya, mendapatkan akses terhadap sumberdaya dan informasi. Model pemberdayaan yang cocok untuk perempuan buruh perkebunan PTPN XII Silosanen adalah melalui sekolah perempuan berdaya dan pengorganisasian. Sekolah perempuan berdaya diharapkan akan mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki untuk lebih sensitif gender. Sedangkan perorganisasian dibutuhkan sebagai langkah yang strategis untuk menjadi wadah bagi perempuan buruh kebun, untuk melakukan diskusi-diskusi dan sharing dalam upaya membangun kesadaran gender, dan sekaligus sebagai alat bargain terhadap pihak perkebunan, perusahaan, maupun di masyarakat.

Program pemberdayaan perempuan perkebunan berbasis kebutuhan strategis gender ini adalah program jangka panjang yang membutuhkan dukungan

dari berbagai pihak yang terkait, yakni masyarakat, laki-laki dan perempuan, ormas, orsospol, aparat desa, dan pemerintah. Untuk itu menjadi penting melibatkan berbagai pihak dalam proses sekolah perempuan berdaya maupun pengorganisasian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk perbaikan hidup masyarakat yang lebih berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Claros, Augusto Lopez dan Zahidi, Saadia. 2005. *Woman Empowerment : Measuring The Global Gender Gap*. World Economic Forum. Diakses dari situs : www.weforum.org, pada 11 Maret 2013
- Darwin, Muhadjir, M, 2005, *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*, Media Wacana, Yogyakarta.
- Demartoto, Argyo dan Budiati, Atik Catur. 2010, *Analisis Kebutuhan Gender (Kajian Mengenai Pembekalan TKW yang akan Dikirim Ke Luar Negeri dalam rangka Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Kabupaten Karanganyar)*, Laporan Penelitian, <http://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/penelitian-kajian-wanita.pdf>, diakses pada 10 Maret 2013
- Fakih, Mansour. 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mulyono, Joko. 2010. *Kebijakan pemberdayaan perempuan Melalui Kebutuhan Strategis dan Praktis Gender*, Jurnal Inspirat, Edisi 1, Tahun 1, Nomor 1, Januari-Juni
- Simatauw, Meentje, dkk. 2001, *Gender dan Pengelolaan Sumberdaya Alam : Sebuah Panduan Analisis*, Yayasan PIKUL, Kupang
- Subhan, Zaitunah, 2002, *Menanggulangi Budaya Marjinalisasi di Perusahaan*, dalam Mimif Hidayat dan Edi Junaedi (Ed): *Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam*, Jakarta: El KAHFI

Akses Internet

- Data BPS, 2011, <http://www.bps.go.id/>, diakses pada 11 Maret 2013
- Data Disbun Jatim 2013, Tenaga kerja, <http://www.disbun.jatimprov.go.id/tenagakerja.php>., diakses pada 11 Maret 2013

Data Disbun, 2011, Data Komoditi Kopi,
http://www.disbun.jatimprov.go.id/komoditi_kopi.php, diakses pada 11
Maret 2013

Data KPU, 2009, www.kpu.go.id, Diakses pada 11 Maret 2012

Departemen Kehutanan, 2005, *Pengarusutamaan Gender Lingkup
DepartemenKehutanan*, Jakarta : Departemen Kehutanan
http://repository.upi.edu/operator/upload/s_sej_022470_chapter5.pdf, diakses
pada 11 Maret 2013

PTPN XII Silosanen,
[http://www.disbun.jatimprov.go.id/dbdata/dwnlad/stakeholder/ptpnxiwili/
PTPN%20XII%20WIL%20II-UUS%20Silosanen.pdf](http://www.disbun.jatimprov.go.id/dbdata/dwnlad/stakeholder/ptpnxiwili/PTPN%20XII%20WIL%20II-UUS%20Silosanen.pdf), diakses pada 11
Maret 2013

<http://www.kemosos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=209>